

POLITIK MEDIA & WACANA KEBUDAYAAN



KONTRAK POLITIK - Capres-wapres Mangku Paikwa-Sugripta merandatangani kontrak politik dengan KAPRI, Tampas Mangku Paikwa dan Putu Wrasita sedang membicarakan tawar-menawaran.



Pertama di Indonesia... K. K. NADHA



Dalam cara tersebut, sulinggih... Sulinggih Kuti Rsi Bhujana

POLITIK MEDIA
& WACANA
KEBUDAYAAN

POLITIK MEDIA & WACANA KEBUDAYAAN

I GA Paramita

Kata Pengantar
I Ngurah Suryawan

PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
2019

POLITIK MEDIA
DAN WACANA KEBUDAYAAN

Penulis:
I GA Paramita

Tata letak:
I Komang Suidiana

Cetakan pertama, Oktober 2019
ISBN:
xxvi + 109 halaman; 14 x 21 cm

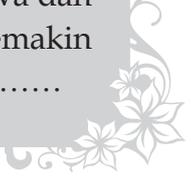
Diterbitkan oleh:
PT. JAPA WIDYA DUTA
Jalan Sedap Malam, Sanur Kaja, Denpasar
Telp. (0361) 4720016

Bekerjasama dengan:

Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar



Buku ini persembahkan kecil saya kepada tiga perempuanku Ida Ayu Gde Apsari Saraswati Djelantik, I Gusti Agung Istri Ayunigtyas Kameswari Paramita, I Gusti Agung Putri Laksmi Paramita yang selalu menemani, memberi semangat, membuatku tersenyum, dalam keadaan apapun. Tawa dan canda mereka membuat dunia ini semakin bermakna. Karena mereka, aku menulis.....



KATA PENGANTAR

Politik Media dan Pembentukan Rezim Kebudayaan

I Ngurah Suryawan

Lemahnya studi media dan kajian teori tentang kebudayaan pada umumnya memberikan jalan mulus bagi dominasi studi politik dan ekonomi atas media massa. Di situ media dianggap sebagai sebagai barang mati. Ia tidak lebih daripada sebuah “alat” propaganda politik penguasa menindas rakyat, atau “alat” propaganda tandingan di tangan kaum oposisi untuk melawan tirani penguasa.

(Ariel Heryanto, 2000)

Latar

Membaca buku I Gusti Agung Paramita (Gung Paramita) yang berjudul *Politik Media dan Wacana Kebudayaan* (2019), kita dibawa untuk menjelajahi bagaimana pentingnya studi politik media dalam

politik kebudayaan Bali. Hal ini tentu saja mengisi kekhawatiran dari pernyataan Heryanto (2000) di atas. Kurang lebih, media mempunyai politiknya sendiri, terlepas dari pengaruh ekonomi politik yang mengitarinya. Media punya siasatnya sendiri. Kita akan diberikan gambaran bahwa kajian media dan politik kebudayaan sangat penting artinya dalam membaca fragmen kebudayaan Bali kontemporer. Kita dibawa untuk tersadar bahwa posisi dan pemikiran institusi (media) dan agen-agennya mengalami kelokan-kelokan tajam perubahan seiring waktu dan kepentingan.

Gung Paramita menunjukkan bahwa media di Bali bukanlah “barang mati”. Ia dengan jelas dan gamblang menjelaskan bahwa keterlibatan media massa adalah salah satu aktor penting dalam momen-momen perebutan kekuasaan politik dan pembentukan politik kebudayaan. Media massa berkecimpung aktif dalam pembentukan kekuatan ekonomi politik sekaligus modal budaya Bali. Sudah bukan rahasia lagi jika media massa berperan penting dalam perjalanan politik kebudayaan Bali. Hadirnya karya ini menjadi penting di tengah keringnya kajian tentang politik media dan pembentukan kebudayaan Bali itu sendiri.

Konteks yang dijadikan kasus dari buku ini adalah bagaimana keterlibatan (baca: keberpihakan) media dalam perebutan kekuasaan politik pada pemilihan Gubernur Bali 2013 - 2018 yang mempertemukan pasangan A.A Ngurah Puspayoga

dan Dewa Nyoman Sukrawan melawan I Made Mangku Pastika dan I Ketut Sudikerta. Dalam pertarungan ini, politik media memainkan isu kebudayaan untuk mendukung dan mendiskreditkan pasangan calon gubernur. Seperti diketahui pada pertarungan ini, untuk kedua kalinya, I Made Mangku Pastika mengokohkan dirinya sebagai Gubernur Bali. Di sinilah cikal bakal pertarungan dimulai.

Pengantar ini bermaksud untuk memberikan konteks sekaligus membahas poin-poin penting yang dielaborasi Gung Paramita dalam bukunya ini. Beberapa poin-poin penting yang akan diuraikan dalam pengantar sederhana ini diantaranya: *pertama*, saya akan mencoba menggambarkan konteks dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali pasca Reformasi 1998. Secara khusus adalah dalam pertarungan pemilihan Gubernur Bali 2013 - 2018. Pada bagian *kedua* saya akan mencoba memberikan konteks kiprah media massa dalam beberapa periode penting kekuasaan di Bali. Bagian *ketiga* pengantar ini mendiskusikan dinamika dukung-mendukung dan pembentukan kebudayaan yang dibangun media Bali Post dan “lawan-lawannya” dalam kontestasi pemilihan Gubernur Bali 2013 - 2018. Pada bagian *keempat* saya akan mencoba secara elaboratif mengusulkan poin-poin diskusi lanjutan untuk memperkaya kajian tentang kajian media dan politik kebudayaan.

Dominasi Banteng

I Made Mangku Pastika meloncat pagar saat bertarung untuk kedua kalinya dalam pemilihan Gubernur Bali 2013 - 2018. Ia maju didukung oleh partai koalisi, salah satunya adalah Partai Golkar, dan berpasangan dengan I Ketut Sudikerta untuk melawan calon PDIP. Sebelumnya, mantan Ketua Tim Investigasi Bom Bali 2002 ini maju didukung oleh PDIP pada pemilihan Gubernur 2008 - 2013 berpasangan dengan A.A Ngurah Puspayoga. Justru kemudian Puspayoga *lah* yang menjadi lawannya. Namun kali ini PDIP harus gigit jari. Kadernya, Puspayoga, takluk. Namun dominasi banteng kembali terjadi saat “memetalkan” (merah totalkan) Pulau Bali untuk kemenangan Koster dan Cok Ace. Kader-kader PDIP juga mendominasi seluruh DPRD se-Bali.

Jika kita menengok ke belakang, PDIP di Bali memiliki sejarah dominasi yang panjang pasca dibungkam Orde Baru dan Golkar *nya* 1966 - 1998. Kader-kader partai moncong putih ini berkiprah penting dalam jagat perpolitikan Bali pasca Reformasi. Terkini, pada pemilihan Gubernur Bali 2019, I Wayan Koster sebagai Ketua DPD PDIP Bali terpilih menjadi Gubernur Bali.

Jika kita menelisik ke belakang, kiprah PDIP Bali yang mencuat kini tidak terlepas dari sejarah panjang kebertahannya melawan dominasi Golkar pada masa Orde Baru. Embrio PDIP Bali adalah sebagian besar kader militan dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang diberangus Orde Baru dan Golkar pasca berjaya

dan menyapu habis anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Tragedi 1965. Merekalah yang menjadi peletak dasar pondasi PDIP Bali. Sebagian lagi sudah tentu adalah kader yang hadir belakangan dan meramaikan perebutan kekuasaan. Rodapun berputar. PNI yang berjaya pada masa Orde Lama diberangus Golkar Orde Baru namun kembali berjaya pasca Reformasi 1998 dan relative konsisten hingga kini menjadi partai besar.

Kajian Agung Paramita dalam buku ini menyinggung juga dominasi PDIP dalam konteks perebutan kekuasaan Gubernur Bali. Seperti diketahui, A.A Ngurah Puspayoga calon yang didukung oleh Media *Bali Post* sebagai (yang) *Ajeg Bali* adalah kader militan PDIP yang kalah melawan Mangku Pastika.

Satu catatan penting dari konteks ini adalah bahwa media massa dan politik saling berkelidan dan memanfaatkan. Politik ini dalam arti yang luas juga terbawa ke pemerintahan. Anggaran-anggaran pemerintah untuk media massa bukan rahasia lagi. Berita-berita *advetorial* (iklan) dijatah oleh pemerintah untuk media massa. Situasi sebaliknya, media massa menjadi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah ini. Fenomena ini menggejala secara serius di Bali dan mempengaruhi independensi (kemerdekaan) media untuk menyampaikan sikap politiknya.

Media dan Politik

Secara lebih luas, media dan politik memiliki sejarah yang panjang di Bali. Pada masa-masa genting tahun 1950-1960-an inilah patut juga dicatat bahwa peranan penting dari media massa, khususnya di Bali. Media massa menjadi salah satu lokus penting yang menciptakan opini publik di Bali pada tahun-tahun tersebut. Dua media massa yang memiliki peranan penting di tahun 1950-1960-an adalah *Suara Indonesia* dan *Harian Angkatan Bersenjata Edisi Nusa Tenggara*.

Harian Suara Indonesia adalah koran pelopor di Bali yang terbit perdana pada 16 Agustus 1948. Selain Suara Indonesia yang berkantor di Jalan Tukad Bulan (sekarang Jalan Bisma) di Tampakgangsul, dalam periode tahun 1960-1965, di Denpasar sempat terbit Mingguan Fajar dan Harian Bali Dwipa. Kantor Mingguan Fajar berada di Jalan Diponegoro yakni di Kantor CBD PKI Bali. Mingguan Fajar banyak menyajikan berita/tulisan tentang kebudayaan. Pengasuhnya antara lain Wardana dan Isjit VS, keduanya adalah mahasiswa Fakultas Sastra, Universitas Udayana.

Harian Bali Dwipa diterbitkan tampaknya untuk mengesankan sebagai Harian Nasakom di Bali. Pengelolanya dikesankan dari unsur-unsur nasionalisme, agama, dan komunisme. Unsur nasionalisme tidak diwakili oleh PNI tetapi oleh Partindo yang di Bali dikenal sebagai parpol mitra dekat PKI (Widminarko, 2001: 31-32). Jadi seluruh media terstigmakan (dianggap) terlibat dalam

“gerakan-gerakan terlarang” pada peristiwa 1965 dan sesudahnya sehingga hanya menyisakan Suara Indonesia (Bali Post) sebagai “pemenang”.

Pada masa itu (tahun 1960an), media massa sepenuhnya dikontrol oleh politik. Widminarko, wartawan dan mantan anggota PNI, mencatat pada tanggal 26 Maret 1965, Departemen Penerangan mengeluarkan peraturan yaitu Keputusan Menteri Penerangan No. 29/SK/M/65 mengenai “Norma-norma Pokok Pengusahaan Pers dalam rangka Pembinaan Pers Indonesia”. Semua surat kabar diwajibkan berafiliasi pada partai politik atau organisasi massa yang diakui pemerintah. Tiap penerbitan pers harus mendapat pernyataan dukungan resmi dari partai politik atau organisasi massa atau Panca Tunggal (lima pejabat tertinggi daerah, semacam Muspida). Susunan dewan redaksi harus mendapat pernyataan dukungan resmi dari pihak yang dijadikan “gandulan”nya. Organisasi atau pihak yang mengeluarkan pernyataan dukungan resmi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab isi koran bersangkutan (Widminarko, 2001: 30).

Berkaca dari sejarah panjang media dan politik tersebut di Bali, tidaklah heran jika media massa ikut menjadi “pemain politik”. Buku Agung Paramita ini secara khusus memotret dinamika media massa yang menjadi “pemain politik” tersebut. Contoh gamblang yang dihadapkannya adalah saat Bali Post (BP) pada saat pemilihan Gubernur Bali Periode 2013-2018 lalu. Saat perhelatan Pilgub Bali 2013 lalu, BP secara *blak-*

blakan menunjukkan sikap politiknya untuk mendukung salah satu calon Gubernur, yakni A.A Ngurah Puspayoga yang berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan.

Kedekatan hubungan antara BP dan salah satu calon turut mempengaruhi sikapnya saat Pilgub Bali. BP berperan aktif dalam melakukan politik pencitraan terhadap figur Puspayoga. Seperti biasanya, BP menggunakan kekuatan wacana *Ajeg Bali* untuk melegitimasi calon-calon yang bertarung pada Pilgub 2013 lalu. Di sini tampak betapa wacana *Ajeg Bali* memiliki peran khusus dalam dinamika politik lokal Bali, khususnya mengarahkan pilihan politik publik.

Mobilisasi preferensi politik publik Bali dilakukan dengan dua cara yakni justifikasi dan provokasi. Mekanisme justifikasi dilakukan dengan mengindentikkan A.A Ngurah Puspayoga dengan wacana *Ajeg Bali*. Sebagaimana diketahui, wacana *Ajeg Bali* sejak pertama digulirkan cukup mempengaruhi struktur-struktur kesadaran orang Bali dalam memandang budayanya. *Ajeg Bali* pun seolah menjadi benteng pertahanan kebudayaan Bali dari ancaman luar. Tingginya ekspektasi orang Bali terhadap wacana *Ajeg Bali*, dimainkan oleh BP dengan mendeklarasikan A.A Ngurah Puspayoga sebagai calon Gubernur yang membawa misi *Ajeg Bali* (Paramita, 2019).

Bius *Ajeg Bali*

Politik kebudayaan *Ajeg Bali* membentuk

tangan-tangan, jejaring, *agency* manusia, yang tergabung dalam berbagai kelompok massa—bisa kelompok massa adat, politik, pemuda, dan lainnya. Jejaring kekuasaan kelompok massa itulah yang kemudian menjadi pengawas sekaligus penjaga kebudayaan, salah satunya adalah media massa.

Perdebatan wacana *Ajeng Bali* mengalir deras pasca ledakan Bom Bali di Legian, 12 Oktober 2002. Saat sebuah momentum besar dan sebagai titik awal menggeliatnya berbagai wacana stabilitas serta keamanan Bali, dan yang terpenting terbangunnya pondasi landasan politik kebudayaan Bali pasca Bom Bali 2002. Gambaran ideal *Ajeng Bali* memberikan banyak perspektif dan memunculkan debat yang panjang. Ada yang mengungkapkan *Ajeng Bali* sebagai sebuah agenda *setting* politik kebudayaan Bali, dimana salah satu poin pentingnya adalah bagaimana menanamkan kepercayaan diri cultural (*cultural confidence*).

ABG Satria Naradha (2004), pimpinan Kelompok Media Bali Post (KMB) menuliskan memang tidak mudah mewujudkan cita-cita (*Ajeng Bali*) tersebut.:

Perlu banyak pengorbanan. Dalam ajaran agama Hindu, ada konsep yang mengajarkan tentang *mulat sarira* atau mawas diri. Mawas diri terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dalam konteks mewujudkan keajegan Bali, hal itu mesti dilakukan di tengah keterpurukan sosio-kultural dan sosio-ekonomi. Walaupun atas

semua itu kita harus *mebrata*. *Mebrata* dapat berarti menghentikan segala bentuk pembangunan yang menghabiskan ruang, hilangnya jati diri, kesenjangan social ekonomi, ketidakadilan, dan hilangnya spiritualitas. Namun *mebrata* bukan pula berarti stagnan, tetapi melakukan pembenahan secara terus-menerus demi tertata tatanan kehidupan yang harmonis dan berkesinambungan tanpa harus kehilangan jati diri sebagai manusia Bali (Satria Naradha, 2004).

Banyak cita-cita ideal dari *Ajeg Bali*, tapi tak kalah juga kritik pedas terhadapnya sebagai sebuah strategi komoditas “pemurnian budaya” yang digerakkan mesin industri media terbesar di Bali, KMB (Kelompok Media Bali Post). Santikarma (2004) mengungkapkan terminologi *Ajeg Bali* berasal dari bahasa Bali biasa yang mempunyai arti “kokoh, tegak, tegar, kekal,, kencang, kuat, dan stabil”.

Merunut pemikiran yang ada dalam wacana *Ajeg Bali*, walaupun mengalami guncangan ledakan bom yang dahsyat, kebudayaan Bali tetap berwibawa, tak tergoyahkan, berdiri tegak, kokoh, dan tegar. Dengan memakai bahasa local, *Ajeg Bali* mempromosikan diri sebagai wacana populis untuk membayangkan otoritas elite tradisional, yaitu kaum Brahmana, aristokrasi, dan kekuasaan negara

yang memakai bahasa Sansekerta sebagai tanda legitimasi atas peradaban seperti dalam slogan Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, Panca Dharma Wanita, dan Sapta Pesona (Santikarma, 2004).

“Jargon Kebudayaan” *Ajeng Bali* tidak hanya membius identitas “ke-Balian” masyarakat Bali, tapi secara tanpa sadar disamping ia--*Ajeng Bali*--telah membekukan kebudayaan, menjadikannya hak milik, juga menyulut benih-benih gerakan esensialisme kebudayaan, dan juga benih-benih fundamentalisme Hindu. Ini karena *Ajeng Bali*—bagi pengikut gerakan esensialisme budaya-- seharusnya berdasar pada ajaran-ajaran agama Hindu yang mendasari kebudayaan Bali. Maka disebutlah kemudian *Ajeng Bali* seharusnya juga *Ajeng Hindu*.

Politik kewaspadaan baru ini terbilang ampuh untuk menyumbat gerakan-gerakan kritis dari kelompok-kelompok *subaltern* di Bali. Istilah yang kemudian menjadi senjata sakti untuk merangkul masyarakat Bali adalah *Mengajegkan Bali*. *Ajeng* dalam konteks ini berarti kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Dan orang Bali berkewajiban untuk memperkuat dan memperkokoh budaya Bali. Orang Balilah yang memiliki dan menjaga kebudayaan Bali tersebut.

Konsep *Ajeng* ini menjadi obat dahaga di tengah kehausan masyarakat Bali untuk mencari benteng dan pertahanan baru. Benteng ini semakin hari semakin kuat dengan bertemunya korporasi media

massa, negara, politisi, kelompok masyarakat adat, kelompok sipil/milisi/preman di dalamnya. Lebih menukik adalah pendalaman dari *Ajeg Bali* yang disampaikan haruslah juga *Ajeg Hindu*. Benteng dan wacana yang bisa lari ke esensialisme dan sudah pasti fundamentalisme agama. Sesuatu yang tidak terhindarkan meskipun dibantah habis-habisan oleh para intelektual *think thank Ajeg Bali* sendiri. Dengan wacana inilah kemudian menciptakan politik kewaspadaan baru. Siapa yang tidak *Ajeg Bali*? Siapa yang tidak menjaga kebudayaan Bali? Sebuah rezim kebenaran dan penciptaan manusia baru telah mulai hadir di Bali. Rezim kebenaran bernama *Ajeg Bali* dan manusia-manusia Bali baru yang *Ajeg Bali*.

Tantangan

Studi Agung Paramita ini berkontribusi besar terhadap mimpi (alm) Prof. Ngurah Bagus mendorong yang mendorong cendekiawan Bali untuk menghadapi dunia dengan keterbukaan pikiran yang kritis, dan bukan mengandalkan sikap yang statis dan berwawasan ke dalam. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi cendekiawan Bali adalah mengembangkan suatu gagasan yang lebih dinamis tentang kebudayaannya yang menawarkan ruang bagi hibriditas dan dimensi-dimensi transnasional (Nordholt, 2010: 101).

Hal ini juga sejalan dengan spirit dalam melihat Bali adalah sebagai sebuah dekonstruksi. Bali, dengan demikian adalah “bangunan” yang harus terus

dibongkar jika tidak ingin beku, statis, dan mati tidak bernyawa. Karena kesadaran untuk terus membongkar itulah budaya Bali selayaknya dipahami sebagai sebuah “bentukan” dari berbagai campur tangan *agency* dan kekuasaan yang membentuknya. Salah satunya adalah bagaimana tangan politik media dalam mengkontruksi rezim kebudayaan bernama *Ajeg Bali*.

Peguyangan, Oktober 2019

I Ngurah Suryawan adalah Dosen FISIP dan Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, Denpasar. Peneliti di WaRC (*Warmadewa Research Center*). Bukunya terbaru berjudul *Mencari Bali yang Berubah* (2018). Kini menekuni studi tentang politik lokal dan isu-isu kebijakan publik. Emailnya: ngurahsuryawan@gmail.com.

PENGANTAR PENULIS

Puja syukur penulis haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), Sang Hyang Aji Saraswati, karena atas *Asung Kertha Waranugraha-Nya*, buku Politik Media dan Wacana Kebudayaan ini bisa diterbitkan. Buku ini berangkat dari hasil penelitian saya tentang wacana-wacana kultural dalam dinamika media massa cetak di Bali.

Ide penelitian dengan mengangkat media massa cetak dan wacana kebudayaan *Ajeg Bali* sebagai kajian berawal dari kegelisahan penulis melihat dinamika pers di Bali dalam arena politik lokal. Pada saat itu media massa cetak Bali menampilkan wajah ganda: sebagai penyalur informasi kepada publik, sekaligus menjadi instrumen politik ideologis dan kapitalistik yang dibungkus melalui wacana *Ajeg Bali*. Halaman-halaman media massa cetak Bali menjadi arena konflik kepentingan. Perang wacana kebudayaan, simbol dan tanda secara terbuka berlangsung di halaman-halaman media massa cetak Bali.

Dalam cermatan penulis, konflik kepentingan dan politik-ideologis dengan melibatkan wacana kebudayaan yang terjadi sebelum pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bali di tahun 2013, merupakan puncak kekacauan yang berdampak pada konstelasi sosial kultural yang pernah terjadi di Bali pasca reformasi. Persoalan ini menarik untuk diteliti.

Penulis sadar betul bahwa isi buku ini sangat jauh dari harapan. Namun bagi penulis, hal ini merupakan wujud maksimal dari pengetahuan yang penulis miliki. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran perbaikan dari pembaca sabar budiman. Akhirnya teriring doa, besar harapan penulis, semoga buku bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan isi buku ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalam, serta setinggi-tingginya kepada rekan-rekan dan senior yang berkontribusi khusus dalam karier akademik penulis. Mereka yang selama ini menjadi 'teman berpikir' yang baik dan kritis, seperti I Gde Jayakumara, I Wayan Budi Utama, Sindhu Gitananda, I Wayan Suka Yasa, I Wayan Westa, Komang Gde Santyasa, Mbah Arya Suharja, I Putu Gelgel, Ketut Suwidiarta, dan seluruh rekan di Universitas Hindu Indonesia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Orang tua penulis I Gusti Agung Subrata Yasa, Ibu Ni Kadek Sumitri, dan dua saudara penulis I Gusti Agung Pandji dan I Gusti Agung Prabawati, yang telah memberikan dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan buku ini. Kepada seluruh kawan-kawan wartawan, terutama di tiga media yang banyak

memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Terkhusus kepada I Ngurah Suryawan saya ucapkan banyak terimakasih karena telah bersedia menulis kata pengantar untuk buku ini.

“Lihatlah orang-orang yang berlebihan ini, mereka memuntahkan empedu mereka dan menyebutnya Koran. Mereka menelan satu sama lain bahkan tidak bisa mencerna diri mereka sendiri”

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Pengantar Penulis	xxi
Daftar Isi	xxv
BAB I	1
Dinamika Pers di Arena Politik Lokal	1
BAB II	
Politik Media dan Wacana Kebudayaan	9
BAB III	
Ideologi dan Wacana Kekuasaan.....	25
3.1 Wacana dan Kekuasaan	25
3.2 Ideologi	32
BAB IV	
Sejarah Media Massa di Bali.....	37
4.1 Berawal dari <i>Surya Kanta</i> Vs <i>Bali Adnyana</i>	37
4.2 Pers Era Kolonial, Kemerdekaan dan Orde Baru	46
4.3 Reformasi dan Kebangkitan Pers Lokal	54
BAB V.....	59
Politik Media dan Wacana Kebudayaan	

di Arena Politik Lokal	59
5.1 Diskursus dan Kekuasaan	59
5.2 Membangun Sensibilitas Sosial	69
5.3 <i>Setting</i> Politisasi Budaya	75
5.4 Orientasi Misionaris Media	82
 BAB VI	 89
Resiko Munculnya Wacana Kebudayaan dalam Politik Media.....	89
6.1 Pergeseran Sensibilitas	89
6.2 Gugatan dan Resistensi Sosial.....	98
6.3 Runtuhnya Jargon <i>AB</i> dan Kebangkitan Media Lokal.....	106

BAB I

Dinamika Pers di Arena Politik Lokal

Pers kita berkembang dalam kuantitas tetapi tidak dalam kualitas – pers yang secara umum masih reaktif dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah pers yang mengarahkan opini publik dengan menerbitkan berita-berita sensasionalistik, bukannya mendidik publik dan membentuk pola pikir yang mengarah ke pembangunan solidaritas sosial, lembaga demokrasi dan demokrasi itu sendiri.

Julia Suryakusuma

(Agama, Seks dan Kekuasaan 2012)

Dalam *Human All to Human* Nietzsche menjelaskan secara garis besar tantangan filosofis yang dimunculkan oleh sistem-sistem media modern. Pers, mesin, lintasan jalur kereta api, telegraf, demikian pendapatnya, adalah premis-premis

dengan kesimpulan yang tidak pernah seorang pun menariknya setelah ribuan tahun. Semua obyek ini merupakan sirkuit media-media yang menentang kepastian-kepastian lama tentang masyarakat, komunikasi dan subyektivitas. Sementara yang lain bisa jadi telah gagal untuk menyusun silogisme berdasarkan premis pers.

Nietzsche tidak segan menarik kesimpulan sendiri tentang dunia baru jurnalisme yang berani. "Lihatlah orang-orang yang berlebihan ini," teriak *Zarathustra*, "Mereka memuntahkan empedu mereka dan menyebutnya Koran. Mereka menelan satu sama lain bahkan tidak bisa mencerna diri mereka sendiri". Menurut Nietzsche, pers menggunakan kemampuannya bicara keras untuk menyerukan, memekakkan telinga, menghasut, dan mengejutkan. Kendati sangat sinis dan penuh ledakan kritikan dalam memandang pers, namun polemik anti-jurnalisme Nietzsche ini mewakili situasi pers di Indonesia.

Secara historis pers di Indonesia melalui tiga arus besar: teritorialisasi, deterritorialisasi dan reteritorialisasi. Periode teritorialisasi pers bisa disimak dalam dinamika internal dan eksternal semenjak pra orde baru ketika Soekarno memegang tampuk pemerintahan, dan orde baru saat Indonesia berada di bawah rezim kekuasaan Presiden Soeharto. Periode deterritorialisasi pers mencuat ketika muncul era kebebasan pers di tanah air, sedangkan reteritorialisasi pers mengemuka dalam wajah

industrial-kapitalistik. Pertama-tama akan dijelaskan penjinakan (teritorialisasi) pers oleh negara dari pra orde baru sampai orde baru sebagai konsekuensi dari dinamika politik dalam negeri.

Pada zaman pra orde baru, pers Indonesia mengalami penyempitan peran dan fungsi, sebatas untuk mendukung cita-cita revolusi dan pemerintahan Soekarno-Hatta. Hal itu didasari atas pertimbangan bahwa republik Indonesia 'baru lahir' setelah sekian lama berada di bawah rezim kekuasaan kolonial. Ketidakramahan pemerintahan Soekarno terhadap pers saat itu cukup beralasan. Situasi politik dalam negeri yang penuh dinamika dengan keterlibatan pers, dikhawatirkan berimplikasi pada gagalnya cita-cita perjuangan republik Indonesia.

Perlu diketahui, media massa pada zaman Soekarno memiliki afiliasi erat dengan partai politik. Media massa berpotensi menjadi alat propaganda, agitasi, dan corong pandangan partai politik. Ada beberapa media yang berafiliasi dengan partai politik saat itu, di antaranya adalah *Harian Rakyat* yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), *Suluh Indonesia* dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), *Pedoman* dengan Partai Sosialis. Selain itu, ada *Indonesia Raya* yang berafiliasi dengan militer (Hill, 2011:52). Bentuk afiliasi politik media massa cetak di Indonesia ini kemudian diformalkan lewat Keputusan Menteri Penerangan (No.29/SK/M/65) tertanggal 26 Maret 1965 tentang "Norma-norma Dasar untuk Badan Usaha Pers dalam rangka meningkatkan pers

Indonesia”.

Dalam surat keputusan itu diwajibkan semua surat kabar dan terbitan periodik untuk resmi mengaitkan diri terhadap partai politik, golongan karya atau partisipasi massa. Staf redaksi dan staf manajemen haruslah orang-orang pilihan partai. Kebijakan (*policy*) ini menjadi pupuk penyubur tumbuhnya pers-pers nasional yang berada di bawah jari-jemari politik partai. Dalam konteks ini bisa disimak bahwa jaringan relasi media massa cetak dan partai politik bersifat historis, bukanlah ahistoris.

Dengan dibukanya akses media massa ke partai politik, memberi ekspektasi terjadinya perdebatan-perdebatan politik yang menggunakan media massa cetak sebagai instrumennya, termasuk melakukan kritik keras terhadap pemerintahan Soekarno. Hal itu membuat pemerintah pada tahun 1957 memberlakukan undang-undang darurat.

Aturan ini digulirkan untuk membendung arus industri pers dalam negeri yang mulai melakukan kritik pedas terhadap pemerintahan Soekarno. Pemerintah menerapkan tindakan-tindakan keras terhadap pers seperti menginterogasi, menahan, memenjarakan para jurnalis, dan melarang penerbitan pers dan sebagainya (Hill, 2011:27).

Tanpa peduli dengan dunia internasional yang mengecam dirinya lantaran melakukan tindak represi terhadap pers, Soekarno bersikukuh untuk tidak mengizinkan kritik destruktif terhadap kepemimpinannya. Saat itu pula muncul yang

namanya Surat Izin Terbit (SIT), tujuannya untuk menyingkirkan terbitan sensasional, bertentangan dengan moralitas, dan pornografi. Bagi media massa cetak yang melanggar rambu-rambu tersebut, akan dikenakan sanksi breidel (Atmakusumah, 2009:27).

Setelah Soekarno lengser dari kursi kekuasaan, pers di Indonesia belum keluar dari teritorialisasi. Rezim otoriter Soeharto memperkeruh dinamika eksternal yang dialami pers. Pembreidelan terhadap media massa yang melakukan kritik terhadap kepemimpinannya semakin galak dilakukan. Bisa dikatakan, rezim Soeharto menandai puncak teritorialisasi kebebasan pers di tanah air.

Pers hanya diperbolehkan terbit manakala 'satu nada' dengan program pembangunan pemerintah. Akses dan saluran-saluran informasi saat itu pun mulai ditutup rapat-rapat. Berita-berita disensor, dengan melibatkan - pinjam istilah filsuf Marxis-Strukturalis Louis Althuser - *state apparatus* yakni militer dan departemen penerangan.

Menurut Dhakidae (Hill, 2011:72) departemen penerangan yang dibentuk Soeharto merupakan titik pusat perwujudan ideologi sekaligus aksi represi pemerintah terhadap pers. Kendali departemen penerangan ini benar-benar dimanfaatkan guna mempengaruhi arah informasi pers. Saat itu juga tidak ada kebebasan berbicara, berserikat, dan mengemukakan pendapat sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai basis konstitusional. Para jurnalis yang dipandang

menghina dengan cara mengkritik kebijakan kepala negara dimasukkan ke dalam daftar hitam. Media massa jadi sangat terkekang dan kesadaran kritis pers terberangus.

Pada titik ini, bisa dilihat di balik distingsi sikap politik Soekarno dan Soeharto, ternyata keduanya memiliki semangat dan linearitas sikap: melarang kebebasan pers di tanah air. Usaha yang dilakukan kedua mantan pemimpin negara itu pun sama, yakni mengontrol dan menyensor isi surat kabar dengan mengeluarkan surat perizinan untuk penerbitan pers di bawah Departemen Penerangan dan militer. Saat itu industri pers bukan lagi jadi lahan kerja yang menjanjikan untuk para pemodal (Hill, 201:39).

Reformasi tahun 1998 menandai sebuah episode baru pers di Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers menjadi legitimasi yuridis berakhirnya rezim negara terhadap kehidupan media. Sejak saat itu, kehidupan media pada umumnya dan dinamika pers pada khususnya memasuki era baru yang disebut kebebasan pers (Iswandi, 2013:12). Kebebasan pers ini semakin diperkuat dengan dibubarkan Kementerian Penerangan oleh Presiden Abdurahman Wahid.

Di sini pers seolah-olah keluar dari kerangkeng teritorialisasi yang dibuat penguasa rezim orde baru dan orde lama, lalu mengarah ke deteritorialisasi - pembebasan dari penjinakan kesadaran kritis pers, sehingga muncul mitos baru terhadap pers: sebagai pengawal demokrasi, kebebasan bicara, menjadi

wahana pendidikan kritis, pembelaan kaum marginal, dan bisa menyuarakan hak-hak konstitusional masyarakat.

Namun lahirnya rezim reformasi bertali kelindan dengan revolusi besar bernama kapitalisme global yang bersumber dari kaidah-kaidah neoliberalisme dan yang menghendaki liberalisme ekonomi global. Sebagai bagian dari proses liberalisme ekonomi global itu, kebebasan pers pasca-orde baru sangat mungkin mengarah pada suatu kebebasan pers yang berpihak pada kepentingan ekspansi dan akumulasi modal (Sudibyo, 2001:16). Apalagi dalam hemat Prancis Fukuyama, saat ini sedang berlaku sistem ekonomi pasar dan sistem demokrasi liberal (Oetama, 2011:324). Pers di Indonesia berada dalam dua himpitan itu.

Menurut Hidayat (dalam Ishadi, 2014:13) kapitalisme orde baru dalam industri media mengarah pada tiga bentuk kebijakan, yakni komersialisasi, liberasi dan internasionalisasi. Maka dari itu, pada satu sisi, institusi pers sebagai satu kombinasi antara kegiatan pers dan kepentingan modal memang telah terbebas dari kekangan rezim penguasa (deteritorialisasi), namun pada sisi lain tampak bahwa perkembangan pers semakin tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman *the invisible hand* mekanisme pasar (reteritorialisasi) serta proses-proses alami akumulasi modal yang mengarah pada konsentrasi dan homogenisasi komoditi informasi (Sudibyo, 2001:16).

Tegasnya, jika di zaman orde lama dan orde baru pers berada di bawah bayang-bayang *state regulation* (mekanisme negara), di zaman reformasi pers terjebak dalam *market regulation* (mekanisme pasar) yang memiliki kekuasaan dominan terhadap teks media (Sudiby, 2001:10). Satu lagi, pers - dalam konteks ini media massa - tersandera dalam kepentingan subyektivitas personal dan ideologi politik pemilik modal, sehingga media tidak hanya sebagai - pinjam istilah McLuhan - *the medium is the message*, melainkan juga agen transfer ideologi.

Di sini tampak media massa membawa bahaya subyektivitas dan obyektivitas. Media massa menghadapi dua dunia: dunia realitas yang obyektif di luar sana (dinamika eksternal) serta dunia subyektif di dalam sini (dinamika internal) (Oetama, 2001:331). Dalam situasi seperti inilah, media massa di daerah, khususnya Bali hidup dengan penuh dinamika internal dan eksternal serta konflik kepentingan.

BAB II

Politik Media dan Wacana Kebudayaan

Pers lokal tidak selalu menjadi agensi terbaik untuk mengungkapkan informasi latar belakang mengenai konflik-konflik lokal dan isu-isu sensitif lain akibat keterlibatan mereka dengan isu-isu itu sendiri. Sebaliknya, seringkali agensi-agensi itu menjadi terlibat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan, entah dengan cara memihak, atau memainkan peranan aktif sendiri

H.S Nordholt (2010:79)

Pers dan wacana kebudayaan di Bali bagai dua sisi mata koin. Pers tidak hanya dilihat sebagai media komunikasi informasi, tetapi juga berperan membangun diskursus kebudayaan dan menjadi representasi budaya kelas tertentu. Hal ini oleh Kuntowijoyo (1997:91) disebut sebagai sensibilitas. Awalnya, istilah sensibilitas muncul dari kalangan

sejarawan Prancis yang menemukan apa yang disebut dengan sejarah mentalitas. Lucien Febvre memberikan nama atau istilah bagi kehidupan emosional sebuah masyarakat pada suatu periode sejarah tertentu dengan berbagai bentuk manifestasinya. Sensibilitas dianggap lebih menggejala daripada sebuah budaya secara keseluruhan, karena hanya menekankan pada satu aspek kehidupan, yaitu emosi dan sensitivitas (Kuntowijoyo, 1997:91).

Gejala sensibilitas pers di Bali muncul sejak reformasi ditandai dengan dideklarasikannya *Ajeg Bali* sebagai wacana kebudayaan oleh pemimpin baru kelompok *Bali Post* – selanjutnya disingkat *BP*, Satria Naradha. Satria Naradha menampilkan dirinya sebagai pemimpin dari suatu gerakan moral yang menyatakan diri hendak melindungi dan memperkuat budaya Bali (Nordholt, 2007:534).

Wacana *Ajeg Bali* diluncurkan saat pembukaan Bali TV pada bulan Mei 2002, ketika Gubernur Bali I Dewa Made Beratha mendesak para pendengarnya agar mengajegkan adat dan kebudayaan Bali. Wacana *Ajeg Bali* ini muncul setelah Bali mengalami berbagai persoalan pembangunan sebagai risiko dibukanya industri turisme. Sebagaimana diketahui, sejak awal 1990-an para investor luar berpartisipasi secara massif dalam gelanggang ekonomi turis di Bali. Ada beberapa agenda pembangunan yang mendapat penolakan keras dari masyarakat Bali.

Pada tahun 1993 misalnya, muncul protes menentang pembangunan Bali Nirvana Resort di

dekat pura suci Tanah Lot, Kabupaten Tabanan. Demonstrasi-demonstrasi masyarakat, yang dipicu oleh kampanye *BP*, sebuah harian lokal yang dihormati, memaksa badan perwakilan resmi konstituensi Hindu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), mengeluarkan deklarasi formal yang berhubungan dengan penjagaan kesakralan candi-candi Hindu (Ramstedt, 2009). Gerakan protes menjadi semakin nyata ketika pada tahun 1997 sebuah protes lain dilancarkan untuk menentang pembangunan sebuah hotel di Padanggalak yang di dalamnya Gubernur Ida Bagus Oka terlibat secara tidak langsung.

Di sini media *BP* mewakili sensibilitas masyarakat Bali yang punya keresahan dan kekhawatiran akan robohnya sendi-sendi kebudayaan Bali akibat dari massifnya pembangunan industri turisme. Tema-tema sensibilitas berada di seputar penyelamatan budaya Bali dari pengaruh eksternal yang meliputi gempuran budaya barat yang mendorong kriminalitas, penggunaan narkoba, sikap hidup hedonis-materialistis yang mengorbankan nilai-nilai keagamaan. Selain itu arus ribuan perantau Muslim dari Pulau Jawa dan Lombok memberikan perasaan tidak mengenakkan bahwa orang Bali tengah menjadi minoritas di pulau mereka sendiri (Nordholt, 2007:506).

Selanjutnya, ketika bom meledak di Legian Kuta 12 Oktober 2002, wacana *Ajeg Bali* kembali mengalir deras (Suryawan, 2010; 256). Menurut Ramstedt

(2009) tragedi bom Bali membawa dampak ikutan seperti (1) muncul ketegangan umum atas Bali yang telah menjadi korban mereka yang datang dari luar untuk mencari keuntungan; (2) penderitaan mendalam dan luas atas jumlah migran Muslim yang semakin besar dan menentang kenormalan “gaya hidup masyarakat Hindu Bali”; (3) kemarahan masyarakat atas peningkatan tindakan diskriminasi terhadap umat Hindu oleh Muslim dan Kristen.

Jika dilihat konstelasi ini, maka pergeseran sensibilitas pun terjadi, yang semula sensibilitas diarahkan pada pembangunanisme, urbanisme, industrialisme pariwisata, bergeser ke sensibilitas etnisitas dan agama. Melalui media *BP* mengerucutlah sebuah wacana, atau lebih tepatnya sebuah tekad untuk melindungi Bali dari pendatang yang merusak keamanan Bali.

Bisa dikatakan, *BP* melalui wacana *Ajeng Bali* mampu membangun sebuah ‘politik kewaspadaan baru’ (pinjam istilah Ngurah Suryawan) bagi masyarakat Bali terhadap ancaman bahaya eksternal. Politik kewaspadaan ini ditularkan sampai ke tingkat Desa Pakraman dengan digencarkannya aksi *sweeping* terhadap pendatang melalui aparatus penjaga *Ajeng Bali: pecalang*.

Wacana *Ajeng Bali* kembali disebarluaskan melalui televisi lokal milik Satria Naradha. Kebudayaan Bali semakin direpresentasikan sebagai eksklusif Hindu. Ini dicapai dengan jalan menekankan kontras-kontras dengan Islam, dan ironisnya dengan

cara meniru format Islam pada saat yang sama. Kontras dengan sapaan Islam *assalam' alaikum*, pada momen *talk show* di Bali TV presenter memulai acara dengan kalimat *Om Swastyastu* dan menutupnya dengan *Om Santhi, Santhi, Santhi Om* secara khusyuk (Nordholt, 2007:536).

Begitu pula ketika sebagian besar jaringan TV Nasional menayangkan doa sore Islam, Bali TV menayangkan doa Hindu pada pukul enam yang mengikuti format Islam dan menggunakan frasa-frasa yang diambil dari doa Protestan (Nordholt, 2007:536). Ida Pedanda Made Gunung (almarhum) – ketua Parisada Campuhan yang konservatif menjadi tokoh paling populer dalam *talk show* Dharma Wacana di Bali TV. Dalam konteks ini kampanye *Ajeg Bali* berjasa besar dalam menegaskan profil etnis eksklusif dari kebudayaan dan agama Bali.

Kampanye wacana *Ajeg Bali* yang dikonstruksi melalui sensibilitas etnis dan agama masyarakat Bali memperkuat posisi dan kekuasaan media BP dalam membentuk opini publik. Wacana *Ajeg Bali* tertanam dalam struktur-struktur kesadaran kolektif orang Bali.

Triguna (2011:61) menyebut peran media cetak maupun elektronik dalam rangka mempopulerkan wacana *Ajeg Bali* telah terbukti. Setidaknya hampir seluruh orang Bali familiar dengan kata *Ajeg Bali*. Istilah *ajeg* ini hampir muncul di seluruh tempat: dalam artikel koran, pada spanduk rapat terbuka, dan dalam obrolan di warung.

Jargon ini seolah menjadi nyawa dalam setiap perbincangan, diskusi, dan sambutan kepala daerah. Wacana *Ajeg Bali* renyah dikunyah oleh para *bebotoh*, para petani, pejabat dan tetua adat (Suryawan, 2010:255). Bisa dikatakan, *BP* berhasil membentuk wacana kekuasaan melalui struktur-struktur diskursif yang mempengaruhi kesadaran publik Bali.

Ajeg Bali pun menjadi semacam pendisiplinan dari sebuah wacana kekuasaan yang menyingkap orang Bali untuk patuh dan meyakinkannya. Kendati demikian, terdapat paradoks dalam wacana *Ajeg Bali*: di satu sisi wacana ini berhasil menghapus konflik-konflik menyangkut kelas dan kasta, sementara di sisi lain ia melegitimasi tindak kekerasan dan sikap reaktif atas nama kebudayaan.

Sebagai wacana kebudayaan, *Ajeg Bali* tidak terlepas dari misi politik-ideologis bahkan kapitalistik dari mesin industri media terbesar di Bali. Hal ini tampak selama pemilihan kembali Gubernur Bali Dewa Made Beratha pada bulan Agustus tahun 2003. Pemilihan itu menunjukkan bagaimana partai politik dan kepentingan media saling terkait. Pada saat itu *BP* memainkan peranan aktif dalam memenangkan pasangan Dewa Made Beratha-Alit Kelakan dari kandidat rivalnya yakni Budi Suryawan-Arka Hardiana, dan Ary Suta-Ngurah Wididana.

Kadidat kuat Calon Gubernur Bali dari Puri Satria yakni Cokorda Ratmadi juga berhasil diredam niatnya maju menduduki posisi Bali satu. Padahal sebelumnya - pria yang akrab disapa Cok Rat -

mengaku rela meninggalkan posisi sebagai Bupati Badung untuk maju merebut kursi Gubernur Bali (Nusa, 8/04/2003). Namun ia tidak mendapatkan restu, baik dari petinggi partai di pusat, terutama Megawati, maupun media *BP*.

Hingga akhirnya, pada tanggal 28 Juli, Cok Rat menggelar jumpa pers di kediamannya. Di depan awak media Cok Rat menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Calon Gubernur Bali. Sikap pengunduran diri Cok Rat ini membuat beberapa simpatisan menangis tersedu. Peristiwa ini menjadi *headline news* harian *Nusa* pada tanggal 29 Juli 2003 dengan judul: *Beratha-Kelakan Hadapi Pembelotan!* Dengan anak judul: *Cok Rat Mundur dari Pencalonan*.

Pada anak berita *headline*, harian *Nusa* juga memuat deru keharuan simpatisan Cok Rat di Puri Satria dengan judul: *Puri Satria Menangis*. Berita ini menjadi semakin dramatis ketika harian *Nusa* memasang foto tangisan simpatisan sebagai foto master di halaman utama. Sementara *BP* merespon pengunduran diri Cok Rat dengan menyebutnya sebagai pahlawan *Ajeng Bali*.

Sikap pengunduran diri Cok Rat ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya Megawati menginstruksikan kader PDI-P di Bali untuk mengamankan rekomendasi yang jatuh pada Dewa Beratha-Kelakan. Ketua DPRD Bali kala itu yang juga Ketua DPD PDI-P Bali, Ida Bagus Wesnawa bekerja keras melakukan konsolidasi guna menjamin soliditas kader yang duduk di DPRD Bali. "Jangan sampai Mega dipermalukan di Bali,"

demikian pernyataan Wesnawa.

Puncaknya pada tanggal 4 Agustus 2003, untuk mengantisipasi benih-benih pembelotan, sejumlah anggota fraksi PDI-P di DPRD Bali 'dikandangkan' di Hotel Bali Cliff Jimbaran Kabupaten Badung. Sebanyak 38 anggota fraksi PDI-P diminta untuk membubuhkan tanda tangannya di atas meterai Rp. 6000. Penandatanganan pernyataan itu sebagaimana ketentuan dalam SK 198 untuk menjamin amannya paket rekomendasi DPP PDI-P.

Upaya konsolidasi cukup berhasil. Dalam pemilihan Gubernur Bali periode 2003-2008 tanggal 6 Agustus 2003, paket Dewa Beratha-Kelakan berhasil meraih 31 suara dari 55 suara anggota dewan. Seorang anggota dewan bernama I Nyoman Sember ikut memilih meskipun duduk di atas kursi roda. Kemenangan paket Dewa Beratha-Alit Kelakan ini disebut oleh media *BP* sebagai kemenangan *Ajeg Bali*.

Peranan yang dilakukan *BP* mengilustrasikan bahwa pers lokal tidak selalu menjadi agensi terbaik untuk mengungkapkan informasi latar belakang mengenai konflik-konflik lokal dan isu-isu sensitif lain akibat keterlibatan mereka dengan isu-isu itu sendiri. Sebaliknya, seringkali agensi-agensinya itu menjadi terlibat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan, entah dengan cara memihak, atau memainkan peranan aktif sendiri (Nordholt, 2010:79). Setelah Dewa Made Beratha, *BP* juga berperan besar mengantarkan paket Made Mangku Pastika dan Anak Agung Puspayoga menjadi Gubernur dan Wakil

Gubernur Bali Periode 2008-2013.

Perubahan konstelasi terjadi pada pertengahan masa kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Tanpa diduga, *BP* memuat sebuah berita dengan mengangkat wacana kebudayaan yang sensitif terhadap figur Made Mangku Pastika. Berita itu menyangkut wacana Pembubaran Desa Pakraman setelah terjadinya konflik masyarakat Budaga-Kemoning pada tanggal 17 September 2011 di Kabupaten Klungkung.

BP mengemas berita itu menjadi *headline news* (berita utama) pada edisi Senin *Kliwon* 19 September 2011 dengan judul "Pasca Bentrok Kemoning-Budaga, Gubernur: Bubarkan Saja Desa Pakraman".

Berita *BP* itu menjadi *running* (berlanjut) pada Selasa *Legi* 20 September 2011 dan disambung pemberitaan hari-hari berikutnya sampai Jumat 24 September 2011 dengan tema yang sama yakni Gubernur Mangku Pastika dianggap mengeluarkan wacana pembubaran desa pakraman di Bali. Berita tentang pembubaran desa pakraman ini menimbulkan spekulasi awal pecah kongsinya antara Made Mangku Pastika dan A.A Ngurah Puspayoga.

Berita ini sempat menghebohkan dan meresahkan publik Bali, karena desa pakraman (instrumen *Ajeg Bali*) adalah entitas vital yang menjadi benteng terakhir pemertahanan adat dan budaya Bali. Keresahan masyarakat Bali itu direfleksikan dengan keluarnya Surat Edaran Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No. 006/SE/MDP Bali/IX/2011 Tanggal

22 September 2011, perihal: Pemberitaan tentang Desa Pakraman yang ditujukan kepada Bendesa Madya MDP Kabupaten/kota se-Bali. Surat edaran ini pada pokoknya menyatakan dua poin.

Pertama, pemberitaan tentang pembubaran Desa Pakraman akhir-akhir ini sangat mengganggu *paiketan* dan *pasikian krama* Desa Pakraman di Bali. *Kedua*, guna mencegah timbulnya pro dan kontra terhadap eksistensi Desa Pakraman di Bali dan lebih meningkatkan suasana kondusif di tengah masyarakat adat Bali, dimohonkan kepada segenap prajuru MDP untuk tidak menyampaikan komentar ke media terkait dengan pemberitaan tersebut (Wahidin, 2012:139).

Yang paling merasa dibunuh karakternya (*character assassination*) dalam pemberitaan bertubi-tubi soal wacana pembubaran desa pakraman di BP adalah Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Usaha pencarian keadilan terhadap sikap *Bali Post* dilakukan dari melaporkan ke dewan pers sampai pada sengketa perdata di pengadilan. Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Denpasar sampai di tingkat banding itu dimenangkan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan nomor putusan: 723/pdtG/2011/PN.Dps.

Menariknya, berita kekalahan BP di tingkat banding menjadi konsumsi berita beberapa media lokal lain di Bali yang memosisikan diri sebagai 'media tanding' BP. Seperti misalnya *Fajar Bali* pada terbitan Kamis 7 Maret 2013 - menurunkan berita

kekalahan *BP* ini sebagai *headline news* dengan judul: Bali Post Keok di Tingkat Banding.

Konflik dua kekuasaan besar di Bali itu mencapai puncak pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari bulan Maret sampai 15 Mei tahun 2013. Gempuran berita *BP* soal Desa Pakraman yang menyasar Made Mangku Pastika (calon inkumben) seolah merupakan *hidden agenda* menyusul dihelat suksesi kepemimpinan di Bali – pemilihan Gubernur Bali. Sebagaimana diketahui, *BP* dalam rentang waktu tiga bulan, tepatnya Maret sampai Mei memuat berita yang beraroma *positif campaign* untuk figur A.A Ngurah Puspayoga – Wakil Gubernur Bali Periode 2008-2013.

Nyaris setiap hari *BP* melakukan konstruksi pencitraan melalui pemberitaan, strategi visual dan *game sign* (permainan tanda) di halaman utama terhadap tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Puri Satria Denpasar tersebut. Pada terbitan Selasa Wage, 30 April Tahun 2013 *BP* memuat satu berita yang menunjukkan kepedulian Puspayoga terhadap Desa Pakraman.

Judul berita *headline* itu yakni: Puspayoga Perkokoh Desa Pakraman. Seperti sebelumnya, *BP* menggunakan wacana *Ajeg Bali* untuk membangun kembali sensibilitas publik Bali. A.A Ngurah Puspayoga pun diidentikkan sebagai calon gubernur yang menjadi representasi *Ajeg Bali*.

Sajian berita ini berbanding terbalik dengan berita tentang bubarkan desa pakraman yang

mengindikasikan Made Mangku Pastika tidak *Ajeg Bali*. Penulis melihat, tujuan dari teknik konstruksi wacana kebudayaan dalam teks media ini jelas: *BP* ingin membangun simpati publik Bali terhadap figur Puspayoga dengan mengambil isu sensitif lokal sekaligus merupakan roh *Ajeg Bali*: desa pakraman.

Sementara Made Mangku Pastika, alih-alih mendapat ruang pemberitaan, malah sebaliknya, *BP* melakukan kritik secara bertubi-tubi terhadap kepemimpinan Mantan Kapolda Bali ini dengan mengambil isu lingkungan, ekonomi, dan wacana budaya - ketika itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika memang sedang bersengketa dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali terkait pengelolaan Taman Hutan Raya. Kritik terhadap kepemimpinan Made Mangku Pastika juga mendapat porsi di sayap kiri dan kaki halaman utama.

Sikap antagonisme media terhadap figur Made Mangku Pastika dengan menggunakan 'senjata' wacana *Ajeg Bali* secara tidak langsung menumbuhkan kembali sensibilitas dalam arena politik lokal Bali. Jika sebelumnya wacana *Ajeg Bali* mampu meredam konflik menyangkut kelas dan kasta, kali ini muncul resistensi aktif terhadap wacana kebudayaan tersebut lantaran dianggap bertendensi ideologis-feodalistik.

Dwipayana (2003) menganalisis, wacana gagasan *Ajeg Bali* ditentukan secara dominan oleh tiga tafsir aktor utama, salah satunya adalah kelompok konservatif romantik. Dipastikan wacana *Ajeg Bali* mengandung selubung kepentingan politis-ideologis

untuk membuka ruang bagi kembalinya struktur politik tradisional yang sedang mengalami krisis legitimasi. Dengan demikian tafsir konservatisme-romantik dalam wacana *Ajeg Bali* bisa membawa Bali ke ranah pentradisional politik maupun refeodalisasi kebudayaan Bali.

Pergeseran sensibilitas ini memberi dampak ikutan terhadap Made Mangku Pastika. Purnawirawan Jenderal bintang tiga ini mendapat dukungan dari beberapa media massa cetak di Bali dengan berbagai macam kepentingan. Dua media massa cetak yang secara terbuka ikut memkampanyekan Made Mangku Pastika yakni *Bali Tribune* dan *Fajar Bali* – dua koran ini terbit setelah reformasi. Koran *Bali Tribune* saat itu dipimpin oleh eks Pemimpin Redaksi BP yakni Made Nariana, sementara *Fajar Bali* dipimpin oleh perantau Katolik dari Nusa Tenggara Timur, Emanuel Dewata Oja – seseorang yang aktif sebagai pengurus Persatuan Wartawan Indonesia, Bali.

Porsi pemberitaan untuk Mangku Pastika di *Bali Tribune* dan *Fajar Bali* memang cukup strategis – selama hampir tiga bulan dua media ini melakukan *positif campaign* secara terbuka terhadap sosok Mangku Pastika, sekaligus memposisikan diri sebagai media *counter* terhadap upaya BP meruntuhkan citra Mangku Pastika di mata publik Bali dengan wacana *Ajeg Bali*-nya.

Keterlibatan dua media massa cetak ini membuat semakin tajamnya konflik kepentingan di balik penyajian wacana kebudayaan di media massa. Saat

itu, halaman-halaman media massa secara khusus *BP*, *Fajar Bali* dan *Bali Tribune* menjadi arena konflik kepentingan secara eksplisit dan implisit di hadapan publik.

Perang wacana kebudayaan, simbol dan tanda secara terbuka berlangsung di halaman-halaman ketiga media massa cetak Bali. Begitu pula imbauan-imbauan, ajakan, dan upaya mendiskreditkan kandidat satu dan lainnya menjadi konsumsi publik selama tiga bulan penuh yakni dari Maret sampai Mei.

Kekisruhan ini meluas dari ranah teks media ke ranah sosial. Puncaknya, pada hari Jumat Tanggal 3 Mei 2013, masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Bali Anti Pembohongan Publik yang berjumlah sekitar 200-an, dengan melibatkan para pemangku, melakukan aksi 'pengabenan massal' terhadap Koran *BP* di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali kawasan Renon Denpasar.

Istilah *pengabenan* digunakan oleh Aliansi ini lantaran mereka menuding *BP* mempunyai niat jahat dan telah memprovokasi publik dengan membuat iklan *banner* di pojok kiri atas yang berbunyi "15 Mei Ganti Gubernur". *BP* dinilai seolah-olah ingin mengajak masyarakat Bali mengganti Gubernur Bali yang pada saat itu masih dipimpin Made Mangku Pastika.

Dalam cermatan penulis, konflik kepentingan dan politik-ideologis yang dibungkus dalam wacana kebudayaan sebelum pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Bali di tahun 2013 dengan melibatkan media massa cetak Bali dan bergulirnya kembali sensibilitas kelompok, menandai terjadi perubahan konstelasi sosial kultural di Bali. *Ajeg Bali* sebagai wacana kebudayaan justru mendapat resistensi dari masyarakat Bali.

Hal ini tampak semakin eksplisit ketika A.A Ngurah Puspayoga, calon gubernur yang diberi labeling *Ajeg Bali* oleh BP mengalami kekalahan dalam Pemilihan Gubernur Bali periode 2013-2018 dengan kemenangan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta yang dikukuhkan melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Kemenangan Mangku Pastika-Ketut Sudikerta yang diusung Koalisi Bali Mandara (koalisi partai di luar PDI-P) sekaligus menandai runtuhnya rezim *Ajeg Bali* dan munculnya sebuah era baru kehidupan sosial-kultural masyarakat Bali melalui tumbuh berkembangnya media-media lokal di Bali dengan membawa kepentingan dan sensibilitas masing-masing.

Ideologi dan Wacana Kekuasaan

Apa yang membuat kekuasaan tetap langgeng, apa yang membuatnya bisa diterima, adalah kenyataan bahwa kekuasaan tidak hanya memberi kita kekuasaan untuk berkata tidak, namun kekuasaan melewati dan menghasilkan sesuatu, menimbulkan kesenangan, membentuk pengetahuan, memproduksi wacana.

Michel Foucault

3.1 Wacana dan Kekuasaan

Michel Foucault (1926-1984) telah memainkan peran utama dalam perkembangan analisis wacana melalui karya teoretik dan penelitian praktis. Di hampir semua pendekatan analisis wacana, filsuf Prancis ini menjadi sosok utama yang dikutip, dihubungkan, dikomentari, dimodifikasi dan juga

dikritik (Marianne, 2007:23).

Dalam konteks ini, sebagai pisau analisis, penulis menyinggung teori Michel Foucault yang berhubungan dengan analisis wacana. Menurut Foucault wacana adalah sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konsep tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Foucault mendefinisikan wacana sebagai berikut:

“Kita akan menyebut wacana sebagai sekelompok pernyataan yang sejauh ini merupakan milik formasi kewacanaan yang sama. Wacana terdiri dari sejumlah kecil pernyataan tempat bisa ditetapkannya sekelompok kondisi eksistensi. Dalam pengertian ini wacana bukanlah bentuk tanpa waktu yang ideal, dari awal sampai akhir, wacana bersifat historis, yang memiliki batas, pembagian, transformasi, mode khusus, dan temporalitas sendiri (Foucault, 1972: 117, dalam Marianne, 2007:24).

Salah satu hal menarik dari konsep Foucault adalah tesisnya mengenai hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Tidak dipungkiri memang, tesis *power knowledge* merupakan substansi pemikiran Foucault. Tesis ini pula yang menjadikan Foucault dianggap memberikan kontribusi bagi

perkembangan ilmu sosial (Suyono, 2002:2).

Foucault mendefinisikan kuasa agak berbeda dengan beberapa ahli lain. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”, di mana seseorang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Kuasa menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan suatu sama lain. Kalau banyak teroris lebih memusatkan perhatian pada negara, maka Foucault meneliti kekuasaan lebih kepada individu, subjek yang kecil (Eriyanto, 2008:66).

Menurut Foucault, strategi kuasa berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan dengan dunia, di situ kuasa sedang bekerja. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-hubungan itu dari dalam (Bertens, 1985:487). Demikian dikatakan Foucault:

“Apa yang membuat kekuasaan tetap langgeng, apa yang membuatnya bisa diterima, adalah kenyataan bahwa kekuasaan tidak hanya memberi kita kekuasaan untuk berkata tidak, namun kekuasaan melewati dan menghasilkan sesuatu, menimbulkan kesenangan, membentuk pengetahuan, memproduksi wacana. Kekuasaan perlu dianggap sebagai jaringan produktif yang

melewati lembaga sosial secara keseluruhan, lebih dari sebagai sesuatu yang bersifat negatif yang fungsinya untuk melakukan penindasan (Foucault, 1980:119 dalam Marianne, 2007:26).

Sebagai contoh dapat disebut hubungan-hubungan sosial ekonomi, hubungan-hubungan yang menyangkut keluarga, seksualitas, media komunikasi, dinas kesehatan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Setiap masyarakat mengenal beberapa strategi kuasa yang menyangkut kebenaran: beberapa diskursus diterima dan diedarkan sebagai benar. Ada instansi-instansi yang menjamin perbedaan antara benar dan tidak benar. Ada macam-macam aturan dan prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kebenaran.

Bagi Foucault, kekuasaan selalu terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan menurut Foucault, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Hampir tidak mungkin kekuasaan tanpa ditopang oleh suatu ekonomi politik kebenaran. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri.

Kuasa memproduksi pengetahuan dan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Konsep Foucault ini

membawa konsekuensi untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu (Eriyanto, 2008:67).

Wacana tertentu hanya menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran di sini, oleh Foucault tidak dipahami sebagai suatu yang datang dari langit, bukan juga sebuah konsep yang abstrak. Akan tetapi, ia diproduksi, setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Di sini, setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan.

Jadi khalayak ditundukkan bukan dengan cara kontrol yang bersifat langsung dan fisik, tetapi dengan wacana dan mekanisme, berupa prosedur, aturan, tata cara dan sebagainya. Masalah ini terutama diuraikan oleh Foucault dalam bukunya, *Discipline and Punish* (1977). Melalui wacana, individu bukan hanya didefinisikan, tetapi juga dibentuk, dikontrol, dan disiplinkan.

Sebelum membahas mengenai struktur diskursif, perlu diketahui bagaimana keterkaitan antara wacana dengan kenyataan. Realitas dipahami di sini sebagai seperangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana.

Realitas itu sendiri, menurut Foucault, tidak bisa didefinisikan jika kita tidak mempunyai akses dengan pembentukan struktur diskursif tersebut. Kita mempersepsi dan bagaimana kita menafsirkan objek dan peristiwa dalam sistem makna tergantung pada struktur diskursif. Struktur diskursif ini oleh Foucault, membuat objek atau peristiwa terlihat nyata. Struktur wacana dari realitas itu, tidaklah dilihat sebagai sistem abstrak yang tertutup.

Menurut Foucault, pandangan kita tentang sesuatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut. Wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipandang benar. Persepsi kita tentang suatu objek dibentuk dengan dibatasi oleh praktik diskursif: dibatasi oleh pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang ini benar dan yang lain tidak. Wacana tentu membatasi pandangan khalayak, mengarahkan pada jalan pikiran tertentu dan menghayati itu sebagai sesuatu yang benar. Atau dalam bahasa Macdonell, wacana itu merupakan suatu arena di mana khalayak berpikir dengan jalan tertentu, bukan jalan lain (Eriyanto, 2008:73).

Wacana membatasi bidang pandang, mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam batas-batas yang telah ditentukan. Ketika aturan dari wacana dibentuk, pernyataan kemudian disesuaikan dengan garis yang telah ditentukan. Di sini pernyataan yang diterima dimasukkan dan mengeluarkan pandangan yang tak diterima tentang suatu objek.

Objek bisa jadi tidak berubah, tetapi struktur diskursif yang dibuat membuat objek menjadi berubah.

Contoh yang paling dramatis barangkali adalah bagaimana struktur diskursif yang dibangun tentang PKI sebagai partai terlarang. Pada masa orde lama, partai ini adalah partai resmi bahkan masuk dalam lima besar partai yang memperoleh suara terbanyak. Di masa orde baru, PKI justru menjadi partai terlarang dengan berbagai keburukannya. Tidak ada yang berubah dalam PKI ini (sebagai objek) tetapi yang membuat ia terlarang adalah struktur diskursif yang secara sengaja dibangun oleh Orde Baru bahwa PKI ini partai yang suka memberontak dan anti-Tuhan. Wacana semacam ini membatasi lapangan pandangan sehingga ketika PKI dibicarakan yang muncul adalah kategori PKI sebagai partai pemberontak dan anti-Tuhan, bukan yang lain.

Wacana membentuk dan mengkonstruksikan peristiwa tertentu dan gabungan dari peristiwa-peristiwa tersebut ke dalam narasi yang dapat dikenali oleh kebudayaan tertentu. Struktur diskursif tersebut adalah bangunan besar, dan secara sistematis batas-batas itu berbentuk sebuah *episteme*, perangkat dari struktur diskursif sebagai suatu keseluruhan melalui mana kebudayaan berpikir. Wacana atau formasi diskursif tertentu memiliki otoritas untuk mendefinisikan apa yang mungkin (boleh atau tidak boleh) untuk dikatakan orang tentang suatu topik. Foucault terus menunjukkan bahwa kekuasaan dikendalikan oleh wacana dan wacana selalu berakar

pada kekuasaan (Storey, 2003:133).

3.2 Ideologi

Louis Althusser adalah salah satu pemikir Prancis (1918-1990) yang lahir di Birmandreis, Aljazair (Bertens, 1985:429). Ia merupakan salah satu tokoh Marxis yang menggunakan pendekatan strukturalisme. Althusser merupakan Marxis-strukturalis terpenting dan mempunyai pengaruh besar dalam kajian-kajian ideologinya (Takwin, 2009:82).

Menurut Althusser, pada Marx struktur-struktur politik dan ideologis pada masyarakat tidak boleh dianggap hanya mencerminkan proses-proses ekonomis. Struktur-struktur politik dan ideologis mempunyai suatu otonomi tertentu. Bisa terjadi bahwa proses ekonomis sebagian ditentukan oleh politik dan ideologi, biarpun hal itu tidak menghindarkan bahwa penentuan seperti itu pada akhirnya harus dimengerti berdasarkan struktur hubungan-hubungan produksi.

Althusser mengilustrasikan interpretasi ini dengan pelbagai contoh. Antaralainia memperlihatkan bagaimana pada abad pertengahan ideologi religius lebih kuat daripada ideologi ekonomi, tetapi keadaan itu justru diperlukan supaya hubungan produksi feodal berjalan dengan baik (Bertens, 1985:436). Althusser melihat Marx tidak merumuskan tentang pemikiran ideologi yang cukup berarti, karena ia terlalu memandang ideologi sebagai representasi dari

basis ekonomi. Keyakinan Marx - bahwa ideologi pasti berubah manakala superstruktur berubah - menurut Althusser itulah yang membuat Marx kurang mencermati keberadaan institusi lain seperti institusi agama, pendidikan, keluarga, media massa dan sebagainya.

Althusser beranggapan bahwa suprastruktur ideologi bukan sekedar representasi dari sisi ekonomi seperti yang diungkap Marx. Ia memandang ideologi seperti sesuatu yang relatif otonom dari pengaruh basis ekonomi. Ideologi bekerja dengan caranya dia sendiri. Ideologi mempunyai kemampuan untuk melancarkan kekuasaan dan pengaruh dengan caranya dia sendiri terhadap arah perkembangan perubahan sosial.

Althusser melihat bahwa ideologi tidak hanya terlihat pada hubungan superstruktur dengan substruktur, atau hubungan negara dan rakyat, atau hubungan antara buruh dan majikan. Ideologi terdapat pada hubungan yang lain, bahkan hubungan sehari-hari antar orang-per-orang. Baginya ideologi ada pada diri setiap orang, hanya saja tidak disadari.

Menurut Althusser, ideologi tidak lagi dipandang sebagai kesadaran palsu tetapi jauh dan dalam lagi merupakan bentuk-bentuk ketidaksadaran yang tertanam pada individu setiap orang (Takwin, 2009:84). Ia mengartikan ideologi sebagai ketidaksadaran yang begitu mendalam *profoundly unconscious*. Oleh karena ideologi adalah salah satu ketidaksadaran, maka praktinya dalam diri manusia

tidak disadari.

Ideologi masuk lewat berbagai sumber yang terkait, terutama lewat struktur masyarakat yang diantaranya adalah keluarga, agama, pendidikan, media massa, dan lain-lain. Althusser lalu membedakan dua jenis "ideologi" yang dikait-kaitkan dengan peran-peran aparatur negara. Ia membagi aparatur negara menjadi (a) *Repressive State Apparatus* (RSA) yang bekerja dengan cara represif lewat penggunaan kekerasan, serta yang (b) dinamakan *Ideologi State Apparatus* (ISA) yang berkerja lebih dengan cara *persuasive*, seperti ideologis agama, pendidikan, keluarga, media massa dan yang lainnya.

Bentuk ideologi pertama (RSA) merupakan ideologi yang dipakai negara untuk memperkuat represi dan penindasan terhadap rakyat. Piranti ini dibagi dari negara yang bersifat fisik, seperti penculikan terhadap aktivis, penangkapan dan pemenjaraan, serta berbagai piranti yang mengandalkan keamanan. Sedangkan yang kedua *Ideologi State Apparatus* tampil dalam bentuk institusi pendidikan, penataran-penataran, film-film dan media massa yang dibuat negara. Bagi Althusser setiap orang punya peranan menyebarkan ideologi dan menjadikan masyarakat mengadopsi ideologis tersebut. Ideologi-ideologi itu terbina lewat banyak hal seperti mitos, agama, dan media massa.

Salah satu hal penting dalam teori ideologi Althusser adalah konsepnya mengenai subyek dan ideologi. Pada intinya ideologi dalam pengertian

Althusser selalu memerlukan subyek, dan subyek memerlukan ideologi. Selain memerlukan subyek, ideologi juga menciptakan subyek. Usaha inilah yang dinamakan interpelasi. Dalam interpelasi ini, individu konkret direkrut menjadi subyek ideologi (Eriyanto, 2008: 99). Sebagaimana disampaikan Althusser.

"Saya akan menyarankan bahwa ideologi bertindak atau berfungsi dengan suatu cara yang merekrut subyek-subyek di antara individu, atau mengubah individu menjadi subyek-subyek melalui operasi yang sangat presisi yang saya namakan interpelasi atau memanggil: hei kamu yang ada di sana!" (Althusser, 1984:51).

Konsep interpelasi adalah hal penting dalam dunia komunikasi. Semua tindakan komunikasi, menurut Fiske (Eriyanto, 2008:100) pada dasarnya menyapa seseorang dan dalam penyapaan selalu terkandung usaha menempatkan dalam posisi dan hubungan sosial tertentu. Semua tindakan komunikasi pada dasarnya adalah proses interpelasi yang menempatkan individu dalam subyek tertentu. Interpelasi juga bukan hanya pembicaraan interpersonal, tetapi juga terjadi dalam isi media. Menurut Tolson (1996:53) teks media selalu menyapa seseorang dan menempatkan seseorang ketika membaca atau melihat teks. Fiske menyebutkan berita dan proses komunikasi secara keseluruhan pada dasarnya adalah praktik dari proses sosial dan hampir

selalu ideologis. Interpelasi adalah bagian penting dari praktik ideologi tersebut.

Sejarah Media Massa di Bali

4.1 Berawal dari *Surya Kanta Vs Bali Adnyana*

Sejarah persuratkabaran (pers) di Bali tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial-keagamaan. Surat kabar lahir dari reaksi masyarakat kelas menengah terdidik Bali yang mengenyam pendidikan barat terhadap persoalan sosial-keagamaan. Sebagaimana diketahui sistem sosial masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh sistem kasta yakni *brahmana* (pemuka agama), *ksatria* (bangsawan), *wesia* (birokrat), *sudra* (masyarakat biasa). Hal tersebut menimbulkan stratifikasi sosial menurut tingkatan kasta, sehingga menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara golongan *Triwangsa* dengan *Jaba Wangsa* (Putra Agung, 2001: 101) termasuk dalam urusan keagamaan.

Munculnya kelas menengah terdidik Bali di era 1920-an ini ditandai dengan lahirnya sebuah organisasi yang bergerak di bidang agama dan

pendidikan, yakni perkumpulan *Suita Gama Tirta* (1921) yang dipimpin oleh I Gusti Putu Djelantik, anggota *Raad Van Kerta* di Singaraja. Organisasi ini bertujuan untuk mengadakan pembaharuan dalam bidang adat istiadat di Bali. Mereka menuntut agar paham *ajewera* dihapuskan (Triguna, 1997:234; Putra Agung, 2001:102).

Para anggota perkumpulan *Suita Gama Tirta* ini terdiri dari golongan *Catur Wangsa*, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pegawai pemerintahan dan guru. Selain untuk pembaharuan di bidang agama, organisasi ini juga memiliki tujuan sosiologis yakni memupuk kerjasama yang baik antara golongan *Triwangsa* dengan golongan *Jaba*. Kemudian pada tahun 1923 sebagai kelanjutan dari perkumpulan *Suita Gama Tirta* lahirlah perkumpulan *Shanti*. Asas dan tujuan dari perkumpulan *Shanti* serta susunan keanggotaannya sama dengan perkumpulan *Suita Gama Tirta* (Putra Agung, 2001: 103).

Pada tahun 1923 perkumpulan *Shanti* mendirikan sekolah perempuan. Panitia pendiri sekolah tersebut terdiri dari Wayan Ruma, Ketut Nasa, Made Kaler, Nyoman Kadjeng, I Gusti Putu Djelantik dan I Gusti Tjakratanaya. Seluruh lapisan masyarakat yang kebanyakan pegawai, guru dan pemuda yang haus akan agama Hindu ikut dalam keanggotaan ini.

Munculnya perkumpulan ini bisa dikatakan sebagai perintis tradisi intelektual di kalangan orang Bali pada masa itu yang banyak menganut *ajewera* – suatu paham yang membatasi orang untuk tidak

mengatakan dan menyebarluaskan pengetahuan agama dan kesunyatan hidup, jika belum saatnya dan sesuai dengan kedudukan (Triguna, 1997:234). Pengetahuan agama kala itu dianggap hanya menjadi monopoli golongan tertentu saja.

Selain membentuk sekolah perempuan, perkumpulan *Shanti* juga menerbitkan kalawarta (*news letter*) di Singaraja tahun 1924 dengan nama *Shanti Adnyana*. Majalah *Shanti Adnyana* memperjelas kebutuhan masyarakat Hindu Bali akan perubahan. Dengan perantaraan *Shanti Adnyana* pengetahuan agama Hindu dapat disebarluaskan ke dalam masyarakat Bali. Majalah ini mendapat respon baik dari kalangan pegawai-pegawai pemerintah dan guru. Kerukunan *Catur Wangsa* dalam mempelajari agama tampak berjalan baik (Dharma Putra, 2005: 72; Triguna 1997:234; Putra Agung, 2001:103).

Pada titik ini, kalawarta *Shanti Adnyana* mampu meredam konflik kelas dan kasta di Bali. Majalah ini mampu mengakomodir segala kepentingan orang Bali dalam memberi informasi dan pengetahuan agama. Bisa dikatakan, meskipun terbit dalam fragmentasi sosial, *Shanti Adnyana* mampu mewakili keseluruhan aspirasi masyarakat Bali. Tulisan dalam *Shanti Adnyana* disunting oleh pengurus organisasi *Shanti*, seperti Ketut Nasa, Nyoman Kajeng, I Gusti Putu Djelantik, dan I Gusti Putu Tjakratenaya.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, hubungan antara *Triwangsa* dan *Jaba Wangsa* yang diperantarai majalah *Shanti Adnyana* ternyata semu.

Tarik-menarik kepentingan ideologis antara pemertahanan tradisi dan keinginan pembaharuan tradisi kembali menjadi persoalan manifest. Di satu pihak, sejumlah guru dan pegawai menginginkan percepatan perubahan adat istiadat, sementara di pihak lain anggota yang berasal dari golongan *Triwangsa* berusaha mempertahankan tradisi (Triguna, 1997: 234).

Pertentangan pendapat kian meletus pada waktu diadakan pertemuan perkumpulan *Shanti* di rumah Ida Gde Suanda, Punggawa Distrik Banjar. Pada pertemuan itu salah seorang anggota *Shanti*, I Ketut Nasa, kepala sekolah desa di Bubunan, mencela tentang tata cara pergaulan masyarakat Bali yang masih membedakan perlakuan berdasarkan kelas sosial. Ketut Nasa di depan sidang mengatakan bahwa agama Bali buruk (Putra Agung, 2001:104). Karena ucapan Ketut Nasa, golongan *Triwangsa* marah dan muncul perdebatan sengit antara Nasa dan golongan *Triwangsa* yakni I Gusti Tjakratanaya dan Ida Gde Suanda. Sejak perselisihan pandangan ini, perkumpulan *Shanti* mengalami kemunduran. Beberapa anggota *Jaba* yang dari kalangan guru minta berhenti. Ketut Nasa dan Nyoman Kajeng - staf redaksi *Shanti Adnyana* memilih keluar.

Friksi ini berimplikasi pada kalawarta *Shanti Adnyana*. Akhirnya, pada bulan Oktober 1924, pemimpin redaksinya, Gusti Tjakratanaya, seorang *Triwangsa* mengambil alih kalawarta *Shanti Adnyana* dan mengganti namanya menjadi *Bali Adnyana* (1925-

1929). Tujuan dari penerbitan ini “*Memadjoakan ada dengan menoeroet atoeran Igama hindoe dan Moeat soera Shanti dan Keperloean oentoek oemoem*”. *Bali Adnyana* terbit dalam bentuk stensilan tiga kali sebulan setebal enam halaman.

Bali Adnyana banyak memuat artikel atau ulasan yang pada prinsipnya mempertahankan atau membela kelompok *Triwangsa*. *Bali Adnyana* berarti pikiran Bali yang memilih terbit sebulan tiga kali setiap tanggal 1, 10 dan 20 (*Bali Adnyana*, No. 15 Th. II: 1; Triguna, 1997:235; Dharma Putra, 2005: 72). Korn (Robinson, 2006: 53) menjuluki *Bali Adnyana* sebagai “koran eksklusif kaum bangsawan”.

Triguna (1997: 235) menafsirkan bahwa *Bali Adnyana* sesungguhnya bukan semata-mata diperuntukkan golongan *Triwangsa*, tetapi situasi kelahirannya menunjukkan munculnya anggapan itu. Situasi yang dimaksud Triguna yakni (1) mulai munculnya keberanian di kalangan jaba wangsa untuk menggugat secara terang-terangan terhadap struktur masyarakat berdasarkan kasta, bersamaan dengan semakin banyaknya golongan *Jaba Wangsa* yang mengenyam pendidikan barat, (2) *Bali Adnyana* dipimpin oleh seorang anggota *Triwangsa* yang sangat fanatik terhadap adat istiadat; dan (3) munculnya majalah tandingan yang disebut *Surya Kanta* yang jelas mencantumkan salah satu tujuannya memperbaiki dan melindungi nasib kaum *jaba* serta mengubah adat yang bertentangan dengan kemajuan zaman.

Kendati demikian, penulis memahami friksi kasta yang sampai meluas ke media massa ini sebagai bentuk pergeseran sensibilitas kelas dari laten ke manifest. Jadi *Bali Adnyana* terlahir dari hasil pergulatan benih-benih sensibilitas dalam kelas sosial yang muncul kembali ke permukaan. Bisa dikatakan media massa mempertajam tumbuhnya sensibilitas kelas sehingga terjadi konflik wacana ideologi.

Walaupun *Bali Adnyana* di awal terbit masih sehaluan dengan majalah *Shanti* karena dalam sub judul majalah memuat kalimat *Moeat soeara Shanti dan keperluan oentoek oemoem*, namun sensibilitas kasta membuat munculnya sebuah anggapan jika majalah *Bali Adnyana* hanya memuat suara-suara atau pikiran yang mewakili golongan *Triwangsa*.

Majalah *Surya Kanta* terbit pada 1 Oktober 1925. Orang-orang yang memiliki inisiatif menerbitkan majalah tandingan *Bali Adnyana* ini yakni Ketut Sandi, Nengah Metra dan Ketut Nasa. Pemimpin redaksi *Surya Kanta* saat itu dijabat oleh I Ketut Nasa. *Surya Kanta* menjadi terompet kaum *jaba* dalam melawan praktik ketidakadilan sistem kewangsaan di Bali. *Surya Kanta* tampil lebih mewah dibandingkan *Bali Adnyana* karena bukan stensilan, tetapi dicetak. Dharma Putra (2005:73) mengira-ngira majalah ini dicetak di Surabaya.

Golongan *Surya Kanta* ingin memberikan pendidikan akal budi manusia melalui media surat kabar. Dalam bidang ekonomi, golongan *Surya Kanta* memberi penerangan terkait perbaikan-perbaikan

kehidupan masyarakat antara lain penyederhanaan dan penghematan upacara *ngaben*. *Surya Kanta* juga menuntut persamaan hak antara golongan *Triwangsa* dengan golongan Jaba dalam bidang hukum.

Triguna (1997:236) mencatat isu-isu yang termuat dalam majalah *Surya Kanta* selama tujuh belas kali terbitan antara Oktober 1925 sampai dengan September 1927. Dalam rentang waktu tersebut, berisi 266 artikel yang terdistribusi dengan isu: usaha melestarikan adat sebanyak 9, perbedaan perlakuan sosial 25, pendidikan dan pengajaran 80, pemerintahan 4, berbagai isu konflik kasta 60, hukum 13, perubahan adat dan agama 17, iklan 6 kabar redaksi 18 dan lain-lain 34.

Sementara untuk *Bali Adnyana* selama satu tahun, dari yang terbit tanggal 10 Januari 1927 sampai dengan 20 Desember 1927 tercatat ada 155 artikel yang dimuat. Artikel berisi isu usaha melestarikan adat dan agama 11, perbedaan perlakuan sosial 21, pendidikan dan pengajaran agama 11, pemerintahan 39, artikel konflik kasta 15, tentang hukum 1, tentang perubahan adat istiadat 17, iklan 18, informasi redaksi dan lain-lain 13.

Dilihat dari frekuensi artikel dari berbagai macam isu yang dimuat di dua majalah tersebut, *Surya Kanta* lebih dominan memuat artikel pendidikan sementara *Bali Adnyana* memuat artikel yang berisikan konflik kasta. Di sini dapat dicermati, *Surya Kanta* memilih melakukan upaya didaktif untuk melakukan transformasi sosial agar bisa berada dalam posisi

berimbang dengan *Triwangsa*. Resistensi terhadap hegemoni kasta pada saat itu dilakukan lewat jalur pendidikan. Mereka memiliki keyakinan bahwa akal budi adalah dasar perbedaan kedudukan orang dengan orang lain dan itu hanya diperoleh melalui sistem pendidikan dan pengajaran sistematis (Triguna, 1987:237). Di sini tampak pengaruh sistem pendidikan barat terhadap anggota kelompok *Surya Kanta* sangat kuat.

Konflik wacana ideologis di surat kabar antar dua kelompok ini memang membuat semakin tajamnya perbedaan pandangan antara keduanya. Surat kabar berperan membangun sensitivisme dan emosi kelompok *Surya Kanta* dan *Bali Adnyana* dalam menyampaikan pikiran dan pandangannya. Dapat dipastikan surat kabar memiliki pengaruh besar dalam membangkitkan kembali sensibilitas kasta pada saat itu. Melalui wadah surat kabar, benih-benih konflik terus tumbuh di kalangan masyarakat Bali dan melahirkan kompetisi-kompetisi. Singkatnya, surat kabar justru mengakibatkan benang kusut konflik kasta di Bali semakin tidak bisa diurai.

Tajamnya rivalitas ideologis yang terakomodir melalui surat kabar, membuat pemerintah Belanda gerah. Sikap Belanda dalam menanggapi kisruh kasta di Bali dapat diketahui dari ucapan *Controleur* di depan rapat pimpinan Perhimpunan *Catur Wangsa Derya Gama Hindu Bali* yang diadakan pada tanggal 13 Juli 1926. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 2 Mei 1926 yang bertujuan untuk melenyapkan

pertentangan kasta yang terjadi di Bali Utara. Kirakira begini pernyataan *controleur* Belanda:

“Agar ocehan-ocehan golongan Jaba jangan dibalas dalam surat kabar. Golongan Bali Adnyana jangan berselisih dengan golongan Surya Kanta dan pemerintah yakin bahwa keduanya mempunyai keinginan yang sama yakni ingin memajukan rakyat Bali, hanya caranya yang berbeda” (Putra Agung, 2001;114).

Sementara perkumpulan *Catur Wangsa Derya Gama Hindu Bali* yang bercita-cita mendamaikan pertentangan paham antara golongan *Bali Adnyana* dan *Surya Kanta* tidak mendapat tanggapan serius dari kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan terus berjalannya pertentangan pandangan yang diserbarluaskan melalui surat kabar yang diterbitkan kedua kelompok tersebut.

Pada tahun 1927 pertentangan kedua golongan ini mulai mereda. Dalam versi Putra Agung (2001:121) meredamnya konflik kasta antarkedua golongan ini disebabkan munculnya kesadaran masing-masing pemimpin redaksi kedua majalah tersebut akan pentingnya rekonsiliasi.

Bali Adnyana menganjurkan kepada semua perwakilan dan simpatisan agar jangan lagi mengindahkan suara dari golongan kasta. Pimpinan *Bali Adnyana* percaya bahwa pemerintah di Bali sudah berlaku adil dan tidak memihak pada satu golongan.

Dianjurkan pula agar semua orang Bali jangan sampai merendahkan derajat kasta lain. Apabila ada yang bermaksud mengubah atau memperbaiki dresta agar dilakukan dengan jalan mufakat.

Upaya rekonsiliasi ini juga dilakukan oleh *Surya Kanta*. Bahkan menurut Putra Agung (2001:122) *Surya Kanta* jauh lebih melangkah maju mendahului *Bali Adnyana*. Pimpinan *Surya Kanta* tidak lagi hanya memperjuangkan aspirasi golongan saja, melainkan menginginkan persatuan rakyat Bali, termasuk membangun cita-cita nasional. Hal ini menyebabkan *Surya Kanta* mengalami kemunduran sampai pada kematiannya. Bulan Agustus dan September 1927 merupakan penerbitan terakhir *Surya Kanta*. Namun muncul pula hipotesa jika *Surya Kanta* mengalami tekanan dari penjajah sehingga memilih berhenti terbit. Korn (dalam Robinson, 2006: 54) menyebutkan administrasi Belanda mengantisipasi komentar yang sering kebablasan mengenai kebangsawanan. Sementara *Bali Adnyana* masih berjalan sampai tahun 1929 dan akhirnya berhenti terbit.

4.2 Pers Era Kolonial, Kemerdekaan dan Orde Baru

Setelah *Surya Kanta* dan *Bali Adnyana* tidak terbit, pada tahun 1931 muncul majalah *Bhawanagara* di Singaraja. Ini adalah majalah kebudayaan pertama yang muncul di Bali. *Bhawanagara* artinya keadaan sejati di negara Bali dan Lombok. Majalah berbahasa Indonesia ini diterbitkan oleh Gedung Kirtya, dengan

redaktur Dr. R Goris, I Gusti Putu Djelantik, I Gusti Gde Djelantik, I Nyoman Kadjeng, dan I Wayan Roema. Majalah ini disebutkan sebagai “soerat boelanan oentoeck memperhatikan peradaban Bali” (Dharma Putra, 2005: 73). *Bhawanagara* terbit perdana dengan tebal 40 halaman.

Majalah *Bhawanagara* ini mendapat dukungan yang sangat antusias pemerintah kolonial yang sangat berkepentingan mempromosikan kesadaran identitas kultural Bali, ketimbang identitas berdasarkan perbedaan kasta atau kesatuan nasional Indonesia/Hindia. *Bhawanagara* diterima oleh administrasi Belanda dengan maksud meredakan perdebatan kasta dan melakukan rekonsiliasi antara golongan *Triwangsa* dan *Jaba*. Gayanya yang hambar dan nadanya yang sengaja apolitis memberi kesaksian tentang asal usulnya (Robinson, 2006: 54). Korn mendeskripsikan jalan pikiran di balik penerbitan majalah ini.

“Seperti orang Bali sendiri, gaya tulisan Koran-koran ini (*Surya Kanta* dan *Bali Adnyana*) berapi-api dan berani. Melalui majalah bulanan *Bhawanagara*, yang terbuka untuk komentator dari kedua belah pihak, diharapkan hadir ungkapan opini yang lebih selaras”.

Memang pada saat itu, kritik antargolongan dikesampingkan, sebaliknya naskah-naskah tentang kebudayaan Bali diutamakan dimuat dalam majalah

ini. Bisa jadi ini adalah proyek politik representasi kolonial terhadap Bali. Dalam pengantar redaksinya untuk edisi perdana disebutkan bahwa *Bhawanagara* akan menggunakan bahasa Bali, namun kenyataannya kebanyakan artikel yang tampil ditulis dalam bahasa Indonesia.

Bhawanagara cenderung memuat ringkasan isi *kakawin* dengan tujuan memasyarakatkan isi lontar-lontar yang ada di Gedong Kirtya. Hooykas pernah mengkritik *Bhawanagara* karena diterbitkan dengan menyedot uang Gedong Kirtya. Uang itu sulit dikembalikan karena majalah tidak laku dijual. Akhirnya *Bhawanagara* hanya bisa terbit sampai tahun 1933 (Dharma Putra, 2005: 75).

Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1935 Bali kembali memiliki majalah baru, bernama *Djatajoe*. Nama *Djatajoe* diangkat dari nama burung pembela Dewi Sita dalam epos legendaris Ramayana. Majalah sosial budaya terbitan Bali Darma Laksana, organisasi sosial kalangan terpelajar Bali ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kebudayaan dalam kehidupannya. Sementara Pendit (2001:57) menilai, *Djatajoe* sebagai media pergerakan kebangsaan dengan nada lokal dari putra-putra daerah untuk maju seperti saudara-saudaranya di Jawa.

Perkumpulan ini mula-mula berdiri di Malang tahun 1931 dengan prakarsa murid-murid Bali yang belajar di MULO seperti I Gusti Ngurah Rai dan Anak Agung Made Djelantik. Informasi lain yang

dimuat dalam *Djatajoe* mengungkapkan bahwa Bali Dharma Laksana lahir sebagai gabungan dari organisasi eka Laksana dan *Balisch Studies Fund* pada tanggal 26 Juli 1936 (Dharma Putra, 2005: 75).

Majalah ini dipimpin oleh I Gusti Nyoman Pandji Tisna, yang ketika itu meraih reputasi nasional sebagai sastrawan melalui novelnya *Ni Rawit Ceti Penjual Orang* (1935) dan termasuk dalam sastrawan Angkatan Poedjangga Baroe. Bentuk dan konsep majalah *Djatajoe* terinspirasi dari majalah *Poedjangga Baroe* yang terbit di Jakarta dengan redaktur Sutan Takdir Alisjahbana dan Armijn Pane. Majalah ini terbit sampai 1941 dan sempat dipimpin oleh Nyoman Kajeng dan I Wayan Badhra. Jadi majalah *Djatajoe* terbit hanya dalam kurun waktu enam tahun.

Ketika masa penjajahan Jepang, muncul media *Bali Shimbun* di Bali. Media massa cetak *Bali Shimbun* mulai terbit sejak 8 maret 1944 dan menggunakan bahasa Indonesia, serta melibatkan anggota redaksi dari wartawan lokal Bali, I Gusti Putu Arka dan Made Sarya Udaya termasuk Ketut Nadha- perintis media terbesar di Bali saat ini, *Bali Post*. Menurut Pendit (2001: 49) wartawan lokal Bali yang tergabung dalam *Bali Shimbun*, termasuk K. Nadha bekerja dibawah pengawasan militerisme Jepang. Salah sedikit saja, nyawa anggota redaksi bisa melayang.

Pada tahun 1945 *Bali Shimbun* berhenti terbit setelah Jepang dikalahkan Sekutu. Namun rupanya K. Nadha telah meyiapkan media massa cetak sebagai pergerakan untuk mempertahankan kemerdekaan

Indonesia. Selama dua tahun (1946-1947) Ketut Nadha mempersiapkan penerbitan media massa cetak ini dengan mendirikan perpustakaan merangkap toko buku. Pada 16 Agustus 1948, untuk pertama kalinya, Ketut Nadha bersama I Gusti Putu Arka dan Made Sarya Udaya, menerbitkan *Suara Indonesia* dalam bentuk majalah. Demikian kesaksian Pendit (2001: 51).

“Dari *Bali Shimbun* dia meneruskan ke *Suara Indonesia*. Suatu keberanian luar biasa. Dengan semangat kebangsaan di dada, Pak Nadha dan teman-teman mendirikan perusahaan surat kabar dalam situasi masih di zaman gerilya tahun 1948 melawan kolonial Belanda dalam bentuk Negara Indonesia Timur ciptaan HJ van Mook. Dia selamat sampai berkembangnya situasi politik yang dikuasai partai-partai di tanah air”.

Masih menurut Pendit, untuk tetap berjuang dalam pers, Pak Nadha menerima tawaran SI untuk dijadikan *Suluh Indonesia* edisi Bali. Ketika situasi politik di Indonesia berkembang pesat, *Suluh Indonesia* kemudian berubah menjadi *Suluh Marhaen*. Ketika itu Koran-koran di Indonesia memang diharuskan berafiliasi dengan partai politik. Bentuk afiliasi politik media massa cetak di Indonesia ini kemudian diformalkan lewat Keputusan Menteri Penerangan (No.29/SK/M/65) tertanggal 26 Maret 1965 tentang “Norma-norma Dasar untuk Badan Usaha Pers dalam

rangka meningkatkan pers Indonesia”.

Dalam surat keputusan itu diwajibkan semua surat kabar dan terbitan periodik untuk resmi mengaitkan diri terhadap partai politik, golongan karya atau partisipasi massa. Staf redaksi dan staf manajemen haruslah orang-orang pilihan partai. Kebijakan (*policy*) ini menjadi pupuk penyubur tumbuhnya pers-pers nasional yang berada di bawah jari-jemari politik partai. Dalam konteks ini bisa disimak bahwa jaringan relasi media massa cetak dan partai politik bersifat historis, bukanlah ahistoris.

Robinson (2006) menyebutkan, selain *Suluh Marhaen*, ada beberapa media lokal pada masa peralihan dari jepang ke pemerintah Republik Indonesia di antaranya *Suara Rakjat*, *Berita Nusantara*, dan *Penindjau*. Namun, ia tidak menyebutkan secara detail tentang siapa pengelola dan apa saja yang dimuat tiga media massa cetak tersebut. Robinson mengutip berita tentang kunjungan Soekarno di Bali, serta adanya kekerasan antarrorang Bali dari ketiga media massa cetak itu.

Pada tahun 1950, terbit majalah *Damai* di Denpasar dan *Bhakti* di Singaraja. Kalau *Damai* dipimpin oleh generasi tua I Gusti Bagus Sugriwa dibantu Anak Agung Bagus Sayoga, Made Ukir dan Ida Bagus Tilem. Sementara *Bhakti* yang terbit di Singaraja dipimpin oleh generasi muda yakni Putu Santi (Pendit, 2001:57) dan Ketut Widjana sebagai pemimpin umum. Majalah terbitan Yayasan Kebhaktian Pejuang yang terbit sampai tahun 1954 ini mengusung slogan sebagai “Majalah untuk umum

non-Partai berdasarkan Pancasila”.

Pada periode 1960 hingga 1965 terbit Mingguan *Fajar* dan *Harian Bali Dwipa* di Denpasar. Mingguan *Fajar* berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kantornya pun sama dengan kantor PKI Bali. Mingguan *Fajar* menyajikan berita dan tulisan tentang kebudayaan dengan moto “Memerahkan Budaya dan Membudayakan Merah”. *Harian Bali Dwipa* dikesankan tampil secara politis sebagai Koran Nasionalisme, Agama, Komunisme (Nasakom) sebagaimana ideologi Sukarno. Namun, unsur nasionalisme tidak diwakili PNI, tetapi Partai Indonesia (Partindo) yang di Bali saat itu dikenal sebagai partai politik yang “dekat” dengan PKI.

Mingguan *Fajar* dan *Bali Dwipa* berhenti terbit menyusul meletusnya peristiwa G 30 S/PKI, 30 September 1965. Sedangkan *Suluh Marhaen* edisi Bali tetap terbit dan menjadi media terbesar di Bali dengan nama *Bali Post*. Pada tahun 1966 di Denpasar lahir *Harian Angkatan Bersenjata Edisi Nusa Tenggara* yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan dan Percetakan Udayana. Pemimpin Umum dijabat Mayor I Gusti Ngurah Pindha, B.A. Penanggung Jawab Letkol. Alex Sutadji, Pemimpin Redaksi Letdha Abdul Hamid.

Media massa cetak ini mengalami beberapa kali pergantian pemimpin dan badan pengelola, serta pernah berhenti terbit. Pada tahun 1978 ia berubah nama menjadi *Harian Umum Nusa Tenggara*. Mayor J.M Sarwoto sebagai pemimpin Umum/Penanggung

jawab dan Jimmy Zeth Soputan sebagai Pemimpin Redaksi. Pada 1990 hingga 1992 Nusa Tenggara dikelola Kelompok Media Group milik Surya Paloh dan tahun 1994 dikelola PT Sinar Press.

Tahun 2001 berubah menjadi Harian Umum Nusa, dan sejak 2005 berubah lagi menjadi Harian *Nusa Bali*. Pada tahun 1980 di Denpasar terbit Mingguan *Karya Bhakti*. Semula terbit dalam format media massa cetak masuk desa mingguan, tetapi kemudian berkembang menjadi harian. Tiga media massa cetak lokal Bali yakni *Bali Post*, Nusa Tenggara, dan Karya Bhakti menjadi pilar media massa cetak yang mewarnai Bali era Orde Baru. Bahkan, Pemerintah Bali waktu ini menjadikan ketiganya sebagai program media massa cetak masuk desa. Saat itu oplah Bali Post 20.152 eksemplar, Nusa Tenggara 11.500 eksemplar, dan Karya Bhakti 10.000 eksemplar.

Sejak dekade 1980, ketika pariwisata Bali mulai mengalami perkembangan pesat, ada beberapa media berbahasa Inggris, di antaranya *Sunday Bali Post*, *Bali Tourist Guide*, *This Week in Bali*. Bali juga pernah melahirkan media khusus agama Hindu di antaranya majalah bulanan Warta Hindu Dharma yang terbit tahun 1987. Majalah terbitan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat ini sebagai besar berita dan artikelnya mengulas tentang topik agama Hindu dan keumatan.

4.3 Reformasi dan Kebangkitan Pers Lokal

Rezim reformasi identik dengan rezim kebebasan pers. Konstelasi ini berdampak pada tumbuh berkembangnya pers-pers lokal, khususnya yang terbit di Bali. Kehidupan media terutama media massa cetak di Bali kemudian semakin semarak. Media-media nasional juga menerbitkan Koran khusus dalam bentuk suplemen yang memuat berita-berita lokal untuk kelas menengah ke bawah.

Pada tahun 2000 terbit Koran *Sinar Bali* yang beralamat di Jalan Sesetan. Berdasarkan hasil wawancara dengan eks-awak redaksi *Sinar Bali*, Koran ini dibiayai terbit oleh beberapa orang pengusaha. Koran *Sinar Bali* terbit Mingguan dengan ketebalan 16 halaman. Format pemberitaan mengkhususkan soal peristiwa sosial-politik-ekonomi sampai budaya yang ada di Bali.

Koran *Sinar Bali* hanya berumur tiga bulan. Pada tahun 2000 *Sinar Bali* diambil-alih oleh Bapak Josef Balu dengan pemimpin redaksi Emanuel Dewata Oja. Mereka adalah perantau Katolik asal Nusa Tenggara Timur yang cukup lama *wara-wiri* di dunia pers Bali. Koran *Sinar Bali* kemudian berubah menjadi *Fajar Bali* yang terbit harian. *Fajar* berarti *Fakta, Jujur dan Arif*. Koran ini juga terbit 12 halaman dengan bermarkas di Jalan Belitung. Bisa dikatakan, Koran *Sinar Bali* yang berubah nama menjadi *Fajar Bali* adalah harian pertama pasca-reformasi yang terbit di Bali sampai saat ini.

Setelah *Fajar Bali*, pada tahun yang sama, dengan menggunakan bendera PT. Bali Intermedia Pers, *Jawa Pos* menerbitkan media massa cetak lokal Bali bernama *Radar Bali*. Koran ini pertama kali terbit pada 12 Februari 2001 dalam bentuk suplemen *Jawa Pos* (Wija, 2013: 78). Misi *Radar Bali* adalah berkehendak untuk menyajikan informasi kepada segenap masyarakat tanpa terkecuali dan menganggap diri tanpa mewakili kepentingan tertentu.

Radar Bali menempatkan isu-isu kriminal sebagai sajian utamanya dengan pangsa pasar kelas menengah urban. Koran yang masih digandeng *Jawa Pos* ini memiliki oplah cukup tinggi di Bali – bersaing dengan *Bali Post* dan *Nusa Bali*. Pasalnya perantau Muslim Jawa lebih cenderung berlangganan *Jawa Pos* tinimbang Koran lokal lain. Setidaknya, *Jawa Pos* mampu membuat perantau Islam Jawa yang mencari peruntungan di Bali tidak merasa terasing. Lewat sajian berita *Jawa Pos*, mereka bisa tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah asalnya.

Tidak berhenti sampai di situ. Meski sempat mengalami guncangan ekonomi akibat bom Bali pada tahun 2002 di Legian Kuta, tidak begitu menyurutkan jumlah surat kabar di Bali. Bahkan pada tahun 2003 Bali lagi-lagi memiliki surat kabar harian lokal. Surat kabar itu bernama *Warta Bali* yang pertama kali terbit Senin 3 Januari 2003.

Warta Bali diterbitkan oleh PT *Warta Bali Utama* dengan I Made Sumer – seorang politisi PDI-P – menjadi direktur utamanya. Alasan penerbitan *Warta*

Bali kala itu adalah ikut meramaikan iklim kebebasan pers yang berkembang di era reformasi. Selain itu, pemilik modal ingin agar di Bali tidak terjadi monopoli publik sehingga masyarakat memiliki alternatif wacana beragam dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan (Putu Artha, 2009:44).

Pada awalnya, menurut pemimpin redaksi *Warta Bali* IGMB Dwikora Putra, pihaknya ingin membuat Koran yang 100 persen lokal. Namun dalam perkembangannya materi-materi yang bersifat nasional dan internasional tidak bisa dihindari mengingat kebutuhan pembaca beragam. Selama tida bulan pertama terbit, *Warta Bali* beredar dengan ketebalan 8 halaman. Setelah memasuki bulan keempat *Warta Bali* terbit teratur tiap hari Senin-Sabtu dengan ketebalan 12 halaman. Namun pada tahun 2013 setelah pemilihan Gubernur Bali, *Warta Bali* hanya terbit Senin-Jumat saja.

Selain *Warta Bali*, pada tahun 2005 terbit lagi Koran *Patroli Nusantara*. Berselang beberapa lama, Koran *Patroli Nusantara* berubah nama menjadi *Patroli* saja, sampai kemudian pada tahun 2010 diganti menjadi *Bali Tribune*.

Dari rentetan sejarah penerbitan di atas, bisa dikatakan volume perkembangan pers setelah reformasi khususnya di Bali sangat massif. Tercatat pasca-reformasi Bali melahirkan lebih dari lima Koran di luar koran yang tergabung dalam *Kelompok Media Bali Post*. Koran-koran lokal ini masih bertahan dengan sajian berita dan pangsa pasar yang beragam.

Ketatnya persaingan bisnis media di atas panggung Bali yang sempit, memang membuat Koran-koran lokal ini harus membangun diplomasi dan negosiasi yang rapi, khususnya dengan pihak pemerintah dan swasta. Apalagi, kedekatan hubungan dengan pemerintah, menjadi salah satu sebab masih bertahannya Koran-koran lokal non *mainstream* ini.

Politik Media dan Wacana Kebudayaan di Arena Politik Lokal

Kekuasaan bukanlah seperti apa yang dikatakan Weberian yakni kemampuan subyektif untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan bukan pula artefak material yang bisa dikuasai dan digunakan oleh klas tertentu untuk menindas dan mendominasi klas lain. Kekuasaan adalah label nominal bagi relasi strategis yang kompleks dalam masyarakat. Dalam relasi itu tentu saja ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang dipusat, di pinggir, ada yang di dalam dan di luar. Kekuasaan itu menyebar, terpecah hadir dimana-mana ibarat jaring yang menjerat.

5.1 Diskursus dan Kekuasaan

Munculnya *Ajeg Bali* sebagai diskursus kebudayaan merupakan produksi dari relasi

kekuasaan yang terjalin melalui formasi diskursif. Formasi diskursif atau gugus-gugus diskursif dinyatakan Michel Foucault sebagai unit konseptual paling elementer untuk mengidentifikasi adanya *episteme*. *Episteme* adalah istilah untuk menamai bagaimana pengetahuan di tiap zaman membuat zaman tersebut mempunyai pengandaian-pengandaian tertentu, prinsip-prinsip tertentu, syarat kemungkinan tertentu, atau apriori-apriori tertentu (Suyono, 2002:151). Singkatnya *episteme* merupakan prakondisi bagi munculnya formalisasi ilmu-ilmu.

Menurut Foucault, proses penyebaran formasi diskursif sama dengan penyebaran wacana atau pengetahuan yang mendistribusikan apa yang dianggap penting dan tidak penting, dianggap benar dan tidak benar. Dalam artian, setiap zaman memiliki formasi dan gugus diskursifnya masing-masing yang disebarluaskan melalui wacana dan menandakan suatu rezim kebenaran tertentu.

Foucault memandang wacana tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Wacana adalah sarana dengan mana suatu institusi memperoleh kekuasaannya melalui proses definisi dan eksklusi (Storey, 2003: 133). Menurut Foucault, kekuasaan dikendalikan oleh wacana dan wacana selalu berakar dalam kekuasaan.

Kekuasaan menurut Foucault, bukanlah seperti apa yang dikatakan Weberian yakni kemampuan subyektif untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan bukan pula seperti yang dikatakan kaum Marxis

sebagai artefak material yang bisa dikuasai dan digunakan oleh klas tertentu untuk menindas dan mendominasi klas lain. Kekuasaan adalah label nominal bagi relasi strategis yang kompleks dalam masyarakat. Dalam relasi itu tentu saja ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang dipusat, di pinggir, ada yang di dalam dan di luar. Kekuasaan itu menyebar, terpencah hadir dimana-mana ibarat jaring yang menjerat (Sahal, 1994).

Wacana bisa meneguhkan sebuah rezim kebenaran, sekaligus meminggirkan rezim lain. Dalam proses peneguhan rezim kebenaran ini, Foucault mengetengahkan beberapa proses yakni seleksi, limitasi, kontrol dan eksklusi. Menurut Foucault, proses seleksi, limitasi, kontrol, dan eksklusi yang melestarikan rezim kebenaran terlaksana melalui dua tingkat yakni internal dan eksternal. Secara internal melalui penyempitan makna dalam produksi dan reproduksi teks (wacana) dan secara eksternal pembentukan dan penyebaran diskursus melalui institusi (Suyono, 2002;184).

Relevansi pemikiran Foucault dengan kemunculan diskursus *Ajeg Bali* terletak pada relasi pengetahuan dan kekuasaan di Bali dalam memproduksi formasi-formasi diskursif untuk meneguhkan suatu rezim kebenaran tertentu. Pembentukan formasi atau gugus diskursif melalui wacana *Ajeg Bali* ini sangat mempengaruhi paradigma dan jangkauan pandang orang Bali terhadap kebudayaannya sendiri.

Wacana kebudayaan yang melanggengkan sebuah rezim kebenaran di Bali ini dilestarikan melalui proses kontrol, seleksi, limitasi dan eksklusi. Melalui wacana *Ajag Bali*, masyarakat Bali mengalami pendisiplinan dan kontrol sehingga harus patuh dan meyakini. Media massa cetak sangat berperan dalam menyebarkan gugus diskursif *Ajag Bali* ini.

Sebagaimana diketahui, wacana *Ajag Bali* diluncurkan saat pembukaan Bali TV pada bulan Mei 2002, ketika Gubernur Bali I Dewa Made Beratha mendesak para pendengarnya agar mengajegkan adat dan kebudayaan Bali. Wacana *Ajag Bali* ini muncul setelah Bali mengalami berbagai persoalan pembangunan sebagai risiko dibukanya industri turisme. Respon terhadap persoalan pembangunan dan munculnya wacana *Ajag Bali* ini turut mengundang perhatian sejumlah kelas menengah terdidik Bali yang difasilitasi oleh media *Bali Post* untuk merumuskan kembali kebudayaan Bali yang paralel dengan wacana *Ajag Bali*.



Gambar 5.1 Seminar *Ajag Bali Bali Post* Tahun 2003

Perbincangan serius tentang *Ajeg Bali* dibingkai melalui kegiatan seminar pada awal bulan Agustus tahun 2003. Banyak pihak yang dilibatkan dalam seminar ini, terutama para kelas menengah terdidik Bali dari berbagai bidang keilmuan. Tepat pada ulang tahun *Bali Post* yang ke-55 tanggal 16 Agustus 2003, hasil dari diskusi tersebut disajikan melalui edisi khusus yang berisi rumusan-rumusan akademisi, budayawan, dan sastrawan Bali tentang wacana *Ajeg Bali* – seorang sastrawan kondang sekelas Putu Wijaya juga ikut meramaikan diskusi *Ajeg Bali*. Kata *Ajeg* sendiri, mengacu pada wacana tentang posisi kebudayaan Bali di Indonesia saat reformasi dan desentralisasi. Menurut pandangan umum dalam seminar tersebut, Bali berada dalam keadaan darurat dan terancam oleh berbagai pengaruh negatif.

Dari hasil perbincangan tersebut, *Ajeg Bali* dimaknai pada tiga tataran. Pada tataran individu, *Ajeg Bali* dimaknai sebagai kemampuan manusia Bali untuk memiliki kepercayaan diri kultural (*cultural confidence*) yang sifatnya kreatif dan tidak membatasi diri pada hal-hal fisik semata. Pada tataran lingkungan kultural, *Ajeg Bali* dimaknai sebagai terciptanya sebuah ruang hidup budaya Bali yang inklusif, multikultural dan selektif terhadap pengaruh dari luar. Pada tataran proses kultural, *Ajeg Bali* diartikan sebagai interaksi manusia Bali dengan ruang hidup budaya Bali guna melahirkan produk-produk atau penanda budaya baru melalui sebuah proses yang berdasarkan nilai-nilai kultural dan kearifan lokal serta memiliki kesadaran ruang serta waktu yang mendalam (Wijaya, 2004: 154-179, Suryawan, 2010:258).

Namun di balik wacana *Ajeg Bali* tersebut, secara tidak langsung terjadi proses homogenisasi kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali diposisikan berada dalam wilayah yang eksklusif sehingga perlu dilindungi dan dirawat keutuhannya. Dari situ muncul pendefinisian dan rumusan baru tentang budaya Bali yang berorientasi pada jargon *Ajeg Bali* seperti pendidikan yang *Ajeg Bali*, arsitektur *Ajeg Bali*, ekonomi *Ajeg Bali*, busana *Ajeg Bali*, lingkungan yang *Ajeg Bali*, sampai pada pemimpin yang *Ajeg Bali*.

Pada saat itu, wacana *Ajeg Bali* seolah mengkonstruksi sebuah rezim kebenaran tentang kebudayaan Bali. Cara pandang orang Bali tentang kebudayaannya 'dibatasi' melalui jargon *Ajeg Bali*. Identitas kebalian orang Bali selalu diidentikkan dengan istilah *Ajeg Bali* tersebut. Dari situ, muncullah manusia-manusia Bali baru yang *Ajeg Bali* (Suryawan, 2010:261).

Dengan meminjam pemikiran Foucault, wacana *Ajeg Bali* menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran di sini oleh Foucault tidak dipahami sebagai suatu yang datang dari langit, bukan juga sebuah konsep yang abstrak. Akan tetapi, ia diproduksi, setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Di sini, setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan (Eriyanto, 2008:67).

Rezim kebenaran *Ajeg Bali* ini dilestarikan melalui proses kontrol/ pendisiplinan, seleksi, limitasi, dan eksklusivitas.

Proses kontrol dan pendisiplinan terjadi secara internal. Orang Bali berangsur-angsur memaknai kebudayaannya secara fisik-material. *Ajeg Bali* diwujudkan dengan cara menggunakan busana adat Bali dalam menjalankan aktivitas keseharian. Tidak terkecuali dalam sektor ekonomi, orang Bali pun mulai mengenakan busana adat Bali sebagai penegasan terhadap *Ajeg Bali* dimaksud.

Sempat di Bali muncul pedagang-pedagang kaki lima yang mengenakan properti tubuh seperti kamen dan udeng. Dagang-dagang berlabel *Ajeg Bali* menyebar sampai di wilayah Desa Pakraman – sebagai tandingan terhadap pedagang luar Bali. Selain itu, rutinitas sosial tradisional di tingkat banjar semakin mantap dilakukan. Orang Bali harus rutin melaksanakan kewajiban-kewajiban adat. Jika tidak mereka akan dikenakan sanksi *kesepe kang* (limitasi). Kontrol dan pendisiplinan terjadi di tingkat desa pakraman.

Hal ini semata-mata untuk mengafirmasi identitas diri sebagai manusia-manusia dan tubuh-tubuh *Ajeg Bali*. Pada titik ini, terjadi semacam penyempitan makna kebudayaan. *Ajeg Bali* menjelma menjadi lampu sorot dalam sebuah benteng yang selalu memantau gerak-gerik warganya yang ingin mencoba berpikir di luar *frame* budaya *Ajeg Bali*.

Sementara proses seleksi terjadi dalam bentuk ‘politik kewaspadaan baru’ yang ditanamkan dalam struktur kesadaran masyarakat Bali terhadap ancaman bahaya eksternal. Politik kewaspadaan ini ditularkan sampai ke tingkat Desa Pakraman dengan digencarkannya aksi *sweeping* terhadap pendatang melalui aparat *Ajeg Bali: pecalang*.

Proses seleksi kependudukan ini terjadi sejak bom

meledak tahun 2002 di Legian Kuta yang dilakukan oleh terorisme luar Bali. Kejadian ini mengindikasikan jika ancaman memang selalu datang dari luar, dan untuk meneguhkan *Ajag Bali* maka proses seleksi ‘manusia’ yang datang ke Bali terus dilakukan.

Tidak hanya itu saja, melalui wacana *Ajag Bali*, kebudayaan Bali dipresentasikan menjadi Hindu. Di sini proses eksklusi bekerja. Menurut Suryawan (2010:261), *Ajag Bali* membekukan kebudayaan, menjadikannya hak milik, dan menyulut benih-benih gerakan esensialisme kebudayaan dan benih fundamentalisme Hindu. Dalam acara-acara yang disajikan Bali TV, muncul aneka macam *talk show* yang *folklorist* Bali Hindu. Tamu-tamu diharapkan tampil dalam busana adat lengkap dan pesan-pesannya memberikan impak nyata. Khususnya dalam *talks show Ajag Bali*, kebudayaan Bali dipresentasikan sebagai hal yang homogen dan relatif statis, yang pada dasarnya bersifat religius dan berakar dalam adat desa (Nordholt, 2007:535).

Menurut Foucault, selain kontrol yang berjalan secara internal dalam mekanisme produksi dan reproduksi sendiri, proses pelestarian rezim kebenaran ini juga tidak dapat dilepaskan dari adanya kontrol eksternal terhadap pembentukan dan penyebaran diskursus. Pembentukan dan penyebaran diskursus menurut Foucault, pada titik ini tidak dapat dibebaskan dari adanya kontrol dan limitasi restriktif yang berasal dari berbagai macam sentrum-sentrum institusi tertentu. Melalui kontrol restriktif institusi ini, diskursus dikendalikan dan digiring ke arah kondisi kebenaran yang dikehendaki (Suyono, 2002:185).

Institusi yang menjalankan fungsi kontrol eksternal

dalam pembentukan dan penyebaran diskursus *Ajag Bali* ini adalah negara, kapitalisme cetak (*Bali Post*), dan institusi desa pakraman. Melalui koneksi jejaring-jejaring kekuasaan institusi ini wacana *Ajag Bali* terus disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik setiap hari. Hal ini membuat masyarakat Bali layah terhadap jargon *Ajag Bali*. *BP* memainkan peran besar dalam penyebaran rezim diskursus *Ajag Bali*, sekaligus memberi cap dan legitimasi terhadap kebudayaan Bali.

Pada titik itu, *BP* seolah menjalankan fungsi seleksi kebudayaan. Media massa ini tidak canggung-canggung membangun dikotomi budaya antara yang *Ajag Bali* dan bukan *Ajag Bali*. Dikotomi ini tidak hanya berlaku dalam wilayah kebudayaan, melainkan meluas ke arena politik lokal. Seperti yang dikatakan Foucault, diskursus selalu dikendalikan dan digiring ke arah kondisi kebenaran yang dikehendaki. Diskursus *Ajag Bali* pun digiring ke wilayah rezim kebenaran yang dikehendaki *BP* dan relasi kekuasaannya.

Penggiringan wacana *Ajag Bali* tampak saat pemilihan Gubernur Bali Periode 2013-2018. *BP* melalui wacana *Ajag Bali* ingin memberi legitimasi terhadap pemimpin Bali ke depan. Di sini *BP* kembali memainkan peran sebagai selektor yang memberikan stempel mana calon gubernur *Ajag Bali* dan calon Gubernur yang tidak *Ajag Bali*. Namun sejak awal, *BP* memilih memberikan cap pemimpin *Ajag Bali* pada figur A.A Ngurah Puspayoga, politisi PDI-P dari Puri Satria.



Halaman Depan *Bali Post* Soal Perkokoh Desa Pakraman

Sejak awal *BP* membangun konstruksi isu tentang sikap tidak *Ajeng Bali*-nya Made Mangku Pastika yang masih menjabat sebagai Gubernur Bali kala itu. Ini bisa dilihat ketika *BP* terus mempublikasi Mangku Pastika dengan pemberitaan yang menyangkut wacana kebudayaan. Seperti wacana Pembubaran Desa Pakraman setelah terjadinya konflik masyarakat Budaga-Kemoning pada tanggal 17 September 2011 di Kabupaten Klungkung.

BP seolah-olah ingin memberi stempel jika Made Mangku Pastika tidak *Ajeng Bali* karena tidak menghendaki adanya desa pakraman. Frase 'bubarkan' menandai Mangku Pastika dianggap ingin berpikir *out the box Ajeng Bali*. Karena berpikir di luar *Ajeng Bali*, maka Mangku Pastika dilimitasi (disisihkan). *BP* pun berperan sebagai 'lampu sorot' yang menyeleksi orang-orang yang tidak *Ajeng Bali*.

Berbeda dengan sosok A.A Ngurah Puspayoga. *BP* secara kontinu mengafirmasi Puspayoga sebagai figur yang *Ajeng Bali* melalui kontruksi wacana kebudayaan. Pada terbitan Selasa Wage, 30 April Tahun 2013 *BP* memuat satu berita yang menunjukkan kepedulian Puspayoga terhadap Desa Pakraman. Judul berita *headline* itu yakni: *Puspayoga Perkokoh Desa Pakraman*. *BP* secara konsisten menunjukkan jika Puspayoga sebagai Calon Gubernur *Ajeng Bali*.

Di sini bisa disimak, *BP* terus secara aktif memainkan diskursus *Ajeng Bali* dalam arena politik lokal. *BP* melalui wacana kebudayaan tersebut ingin melanggengkan sebuah rezim kebenaran yang dibuat dan dikehendaki. Pada titik ini terlihat betapa wacana selalu identik dengan kekuasaan. Seperti kata Foucault, wacana dan kekuasaan selalu terjalin. Setiap kekuasaan disusun, dimapankan dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Jadi wacana *Ajeng Bali* muncul sebagai produk dari relasi-relasi kekuasaan.

5.2 Membangun Sensibilitas Sosial

Munculnya *Ajeng Bali* sebagai wacana kebudayaan –jika dilihat dari kecamata di atas–merupakan produk dari pers yang mewakili sensibilitas sosio-kultural masyarakat Bali. Upaya membangun sensibilitas yang dilakukan pers atau media massa cetak di Bali muncul sejak reformasi ditandai dengan dideklarasikannya *Ajeng Bali* sebagai wacana kebudayaan oleh pemimpin

baru kelompok *BP*, Satria Naradha.

Satria Naradha menampilkan dirinya sebagai pemimpin dari suatu gerakan moral yang menyatakan diri hendak melindungi dan memperkuat budaya Bali (Nordholt, 2007:534). Wacana *Ajeg Bali* ini muncul berdasarkan pada sensibilitas pembangunanisme, industrialisme, dan urbanisme di Bali. Sebagaimana diketahui, sejak awal 1990-an para investor luar berpartisipasi secara massif dalam gelanggang ekonomi turis di Bali. Ada beberapa agenda pembangunan yang mendapat penolakan keras dari masyarakat Bali.

Pada tahun 1993 misalnya, muncul protes menentang pembangunan Bali Nirvana Resort (BNR) di dekat pura suci Tanah Lot, Kabupaten Tabanan. Demonstrasi-demonstrasi masyarakat, yang dipicu oleh kampanye *Bali Post*, sebuah harian lokal yang dihormati, memaksa badan perwakilan resmi konstituensi Hindu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), mengeluarkan deklarasi formal yang berhubungan dengan penjagaan kesakralan candi-candi Hindu (Ramstedt, 2009). Ditentukan bahwa radius kesakralan di sekitar enam candi utama pulau ini (*sad kahyangan*) harus berukuran lima kilometer, di mana kesakralan candi-candi lokal (seperti candi-candi desa atau *kahyangan tiga*, candi-candi irigasi atau *pura subak*, dsb.) harus berukuran dua kilometer. Kedua ukuran ini secara kebetulan dilanggar oleh proyek BNR.

Guna menenangkan kemarahan publik yang

didorong oleh proyek BNR itu, Presiden Suharto memberlakukan deklarasi tahun 1994 yang dikeluarkan oleh PHDI. DPRD Bali dengan demikian menghentikan proyek ini hingga Komisi Pengukuran Pengaruh Lingkungan mengeluarkan laporannya tentang kasus BNR ini. Sementara itu, agen-agen pemerintah pusat ikut campur di dalam melanggar deklarasi PHDI itu berdasarkan pada penafsiran yang salah tentang prinsip *adat "desa, kala, patra"* di seluruh Bali.

Prinsip ini biasanya dipahami menunjukkan bahwa segala sesuatu harus diputuskan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan khusus tempat dan waktu tertentu dan juga kebutuhan-kebutuhan yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman khusus dan cara-cara masyarakat yang terlibat (Surpha 2006: 8, 32). Gerakan protes menjadi semakin nyata ketika pada tahun 1997 sebuah protes lain dilancarkan untuk menentang pembangunan sebuah hotel di Padanggalak yang di dalamnya Gubernur Ida Bagus Oka terlibat secara tidak langsung.

Di sini media *BP* mewakili sensibilitas budaya masyarakat Bali yang punya kegelisahan dan kekhawatiran akan robohnya sendi-sendi kebudayaan Bali akibat dari massifnya pembangunan industri turisme. Tema-tema sensibilitas berada di seputar penyelamatan budaya Bali dari pengaruh eskternal yang meliputi gempuran budaya barat yang mendorong kriminalitas, penggunaan narkoba, sikap

hidup hedonis-materialistis yang mengorbankan nilai-nilai keagamaan. Selain itu arus ribuan perantau Muslim dari Pulau Jawa dan Lombok memberikan perasaan tidak mengenakkan bahwa orang Bali tengah menjadi minoritas di pulau mereka sendiri (Nordholt, 2007:506).

Ketika bom meledak di Legian Kuta 12 Oktober 2002 dengan menewaskan 202 orang, 164 orang di antaranya warga asing dari 24 negara, 38 orang lainnya warga Indonesia, dan 209 orang mengalami luka-luka cukup memberikan tamparan keras terhadap pariwisata Bali. Apalagi aksi pengeboman ini bermotif terorisme dengan tujuan 'jihad' dari pengikut Islam garis keras yang dilakukan Amrozi cs. Munculnya aksi terorisme ini secara langsung menggelorakan kembali wacana dan diskursus *Ajeg Bali* di tengah-tengah kehidupan masyarakat Bali.

Implikasi dari aksi terorisme dengan mengatasnamakan agama tersebut adalah terjadinya pergeseran sensibilitas, yang semula sensibilitas diarahkan pada pembangunanisme, urbanisme, industrialisme pariwisata, bergeser ke sensibilitas etnisitas dan agama. Melalui media *BP* mengerucutlah sebuah wacana, atau lebih tepatnya sebuah tekad untuk melindungi Bali dari pendatang yang merusak keamanan Bali. Wacana *Ajeg Bali* pun kembali disebarluaskan melalui televisi lokal milik Satria Naradha dan mendapat respon yang sangat massif dari masyarakat Bali. Wacana *Ajeg Bali* seolah menjadi penegasan identitas kultural (yang kental Hindu)

sekaligus sebagai penanda agar orang Bali lebih awas terhadap pendatang Islam.

Kampanye wacana *Ajeg Bali* yang dikonstruksi melalui sensibilitas etnis dan agama masyarakat Bali memperkuat posisi dan kekuasaan media BP dalam membentuk opini publik. Wacana *Ajeg Bali* tertanam dalam struktur-struktur kesadaran kolektif orang Bali. Pada titik ini peran media cetak maupun elektronik dalam rangka mempopulerkan wacana *Ajeg Bali* sangat efektif.

Namun pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, sensibilitas sosial yang terbangun melalui wacana *Ajeg Bali* dieksploitasi oleh BP untuk memberikan legitimasi kepemimpinan di Bali. Di sini sensibilitas etnik dan agama pasca bom Bali yang terbangun melalui wacana *Ajeg Bali* diseret ke arena politik lokal. Wacana *Ajeg Bali* digulirkan oleh BP untuk membangkitkan kembali emosional (sensibilitas) masyarakat Bali dalam memilih pemimpin, tentunya pemimpin yang dianggap sesuai dengan rumusan dari jargon *Ajeg Bali* tersebut.

Pada tahun 2013, ketika hajatan politik pemilihan Gubernur Bali periode 20013-2018 bergulir, wacana *Ajeg Bali* mewarnai arena politik lokal Bali. Pada saat itu BP terus mengeksploitasi wacana *Ajeg Bali* guna membangun sensibilitas sosial untuk memilih pemimpin Bali. A.A Ngurah Puspayoga yang saat itu menjadi salah satu calon Gubernur Bali berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan (politisi dari Buleleng) direpresentasikan sebagai calon Gubernur

dan Wakil Gubernur yang membawa misi *Ajeg Bali*.

Artinya, Puspayoga-Sukrawan dianggap paralel dan relevan figurinya dengan rumusan *Ajeg Bali* yang dibuat BP. Sementara figur yang lain (Made Mangku Pastika) justru dianggap ‘ancaman’ terhadap ketahanan adat dan budaya Bali. Kebetulan saat itu, Made Mangku Pastika menggunakan akronim *Mandara* sebagai rumusan visi dan misinya dalam membangun Bali. *Mandara* kepanjangan dari Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Istilah ‘maju’ mungkin dianggap bertentangan dengan frase *Ajeg* dimaksud.

Dari pemetaan di atas bisa dijelaskan bahwa kemunculan *Ajeg Bali* sebagai wacana kebudayaan merupakan upaya media massa cetak Bali (Bali Post) dalam membangun sensibilitas sosio-budaya di Bali sesuai dengan situasi emosional masyarakat. Dari sensibilitas yang mengarah pada industrialisasi dan pembangunanisme pariwisata, menjadi sensibilitas etnisitas dan agama pasca bom Bali, sampai sensibilitas klan dalam arena politik lokal.

Pada titik ini, pers tidak hanya mewakili sensibilitas kelas—seperti yang dijelaskan Kuntowijoyo, melainkan berperan aktif dalam membangun sensibilitas sosial tersebut. Pers berkecenderungan memonopoli sensibilitas publik untuk tujuan-tujuan dan kepentingan tertentu. Dalam artian, media massa cetak memainkan sebuah periode emosional masyarakat untuk melanggengkan kekuasaan dan posisinya melalui wacana kebudayaan.

5.3 *Setting* Politisasi Budaya

Konstruksi wacana-wacana kebudayaan di Bali mengindikasikan telah terjadi sebuah *setting* politisasi budaya. Politisasi budaya ini dimainkan oleh para aktor - baik aktor lokal, nasional, maupun internasional - dengan modal-modalnya. Jika peneliti Belanda, Henk Schulte Nordholt menggunakan istilah 'benteng terbuka' untuk Bali, maka penulis menganalogikan Bali sebagai sebuah arena. Bourdieu (dalam Jenkins, 2004:124) menjelaskan arena sebagai tempat para agen, individu maupun lembaga saling berusaha menguasai struktur dan posisi obyektif dalam masyarakat.

Arena adalah suatu arena sosial yang di dalamnya perjuangan atau manuver terjadi untuk memperebutkan sumber atau pertaruhan. Arena didefinisikan sebagai taruhan yang dipertaruhkan - seperti benda-benda kultural, perumahan, kemajuan intelektual, pekerjaan, tanah, kekuasaan, kelas sosial, prestise dan yang lainnya (Jenkins, 2004:124).

Setiap arena memiliki logika berbeda, struktur keharusan dan relevansi yang diterima sebagaimana adanya yang merupakan produk dan produsen habitus. Arena juga merupakan suatu sistem posisi sosial yang terstruktur - yang dikuasai oleh individu atau institusi - suatu inti yang mendefinisikan situasi untuk mereka anut. Ini juga suatu sistem kekuatan yang ada di antara posisi tersebut: suatu arena yang distrukturkan secara internal dalam konteks relasi

kekuasaan.

Posisi arena ada dalam relasinya dengan dominasi, subordinasi atau ekuivalensi (homologi) satu sama lain, karena akses yang dapat mereka raih atas benda atau sumber (modal yang dipertaruhkan di arena). Benda-benda ini secara prinsipil dapat dibedakan menjadi empat kategori: modal ekonomi, modal sosial (berbagai jenis relasi bernilai dengan pihak lain yang bermakna) modal kultural, dan modal simbolis (prestise dan gengsi sosial).

Sebagai sebuah arena - menurut Dwipayana (2005: vii) - Bali mengalami politik representasi. Pertama Bali dicitakan sebagai pulau yang turistik, kedua citra Bali dengan identitas budayanya yang tunggal dan homogen dan ketiga citra Bali dengan keajegan budayanya (wacana *Ajeg Bali*). Ketiga citra populer yang dilekatkan pada Bali ini bukanlah sesuatu yang turun dari langit, melainkan suatu yang bisa dibangun dan dibentuk.

Pichard (2006:27) menjelaskan bagaimana pemerintah kolonial Belanda membangun citra Bali yang berdasarkan pada pelestarian budaya berikut promosinya melalui pariwisata. Mereka membangun citra Bali yang laksana sebuah tempat suci, sebuah dunia tersendiri, unik dan rapuh. Oleh karena itu Bali mesti dilindungi dari dampak modernitas serta seluruh pengaruh negatif dari luar. Pemerintah Belanda juga mendefinisikan kembali citra Bali dari citranya sebagai tempat yang liar, tek beradab, penjual budak, pengkonsumsi candu, menjadi citra pulau

surga. Pelukis Miquel Covarrubias dalam bukunya *Island of Bali* – merepresentasikan Bali sebagai surga terakhir.

Melalui kebijakan *Baliseering* atau ‘Balinisasi’ yang diterapkan pada tahun 1920-an, pihak Belanda tidak hanya sekadar mencoba melindungi Bali dari pengaruh luar, namun mengajarkan pula bagaimana menjadi orang Bali yang sebenarnya. Kebijakan itu bertujuan meningkatkan kesadaran kaum muda atas kekayaan warisan budayanya, melalui pendidikan yang menekankan pelajaran bahasa, sastra dan kesenian tradisional. Sambil di sisi lainnya secara aktif menekan segala wujud modernisme yang tidak selaras.

Selain itu, pejabat kolonial Belanda juga berhasil menciptakan citra tentang Bali sebagai sebuah pulau Hindu yang dikelilingi oleh ‘lautan ribuan pulau Islam’. Dengan demikian identitas keagamaan orang Bali dibangun sebagai sesuatu yang *liyan* dengan pulau-pulau sekitarnya yang Islam. Orientalis yang dipekerjakan oleh pemerintah Belanda bahkan menyebut Bali sebagai ‘museum hidup’ dari kebudayaan Hindu Jawa (Pichard, 2006:26). Melalui pembentukan politik identitas semacam itu, orang Bali mendefinisikan diri dan kebudayaan mereka sendiri dengan berdasarkan pada rumusan dan definisi kaum orientalis barat.

Tidak hanya Belanda, Pemerintah Orde Baru juga berperan dalam membentuk identitas orang Bali. Pemerintah Orde Baru mendomestifikasi identitas-

identitas etnik demi mengkomodasikannya dalam kerangka pembangunan ekonomi. Pada saat Orde Baru pula muncul wacana-wacana budaya yang menunjukkan citra Bali yang turistik seperti Bali Sapta Pesona, Pariwisata Budaya – yang dimaknai sebagai pariwisata yang berorientasi pada pemertahanan kebudayaan, bukan budaya pariwisata.

Sejak tahun 1970-an pariwisata telah menjadi salah satu bagian dari kebudayaan Bali. Gagasan tentang turisme kultural tidak hanya mengisyaratkan komoditisasi kebudayaan, tetapi juga turistifikasi masyarakat yang mengaburkan batas-batas artifisial antara kebudayaan dan turisme. Dengan demikian turisme telah memberikan sumbangan pada pembentukan budaya Bali yang telah menjadi marketable objek (Pichard dalam Nordholt, 2007:506).

Sebagai pulau surga, Bali juga senantiasa harus terjaga, baik dari sisi keamanan, kedamaian dan ketertiban. Konsekuensinya, tidak boleh ada keributan, kritik, kekerasan, konflik apalagi kerusakan, karena itu bisa menimbulkan kesan Bali tidak aman. Akibat dari citra ketidakamanan Bali tentu saja merosotnya iklim pariwisata Bali yang akan merugikan banyak pihak termasuk negara. Menurut Dwipayana (2005) nyanyian pulau surga ini sangat efektif menurunkan suara-suara kritis orang Bali sekaligus memperteguh budaya *koh ngomong* di Bali. Padahal pihak yang diuntungkan terhadap ‘pembungkaman’ ini adalah investor dan kapitalisme pariwisata di Bali.

Pada titik bisa bisa dikatakan, pemerintah kolonial dan Orde Baru berhasil membuat *setting* politisasi budaya di Bali untuk kepentingan-kepentingan politik ekonomis dengan cara merepresentasikan atau membangun citra Bali yang otentik. Sebagai sebuah arena, Bali terus dibentuk dan diciptakan melalui tangan-tangan para aktor dengan wacana-wacana kebudayaannya. Di balik itu semua, ada agenda-agenda politis, salah satunya adalah kolonisasi budaya. Hal inilah yang dilakukan pemerintah kolonial.

Pihak Belanda dan Pemerintah Orde Baru menyeret orang Bali ke dalam habitus-habitus yang mereka diciptakan - melalui pembentukan-pembentukan citra Bali. Tidak pelak, orang Bali mengalami beberapa kali kekerasan simbolik. Menurut Bourdieu (dalam Jenkins, 2004:157) kekerasan simbolik adalah pemaksaan sistem simbolisme dan budaya terhadap kelompok atau kelas sedemikian rupa sehingga hal itu dialami sebagai sesuatu yang sah. Sistem-sistem simbolik dan wacana-wacana budaya yang dikonstruksi oleh pihak luar tentang Bali inilah berdampak pada cara orang Bali dalam mendefinisikan dirinya dan kebudayaannya.

Namun sejak tumbangya rezim Orde Baru dengan ditabuhnya gong reformasi, *setting* politisasi budaya mulai dimainkan aktor dari Bali sendiri - melalui kelompok media *BP*. Saat itu muncul wacana kebudayaan yang dibungkus lewat istilah *Ajeg Bali*. Wacana ini tidak jauh berbeda dengan citraan

pemerintah kolonial Belanda dan Orde Baru yakni mendukung pemurnian – *keajegan* – kebudayaan Bali yang berlandaskan pada adat istiadat setempat.

Wacana *Ajeg Bali* memang seolah menjadi corong lokal untuk membentengi Bali dari pihak-pihak eksternal yang merumuskan dan mendefinisikan Bali dengan cara mereka. *Ajeg Bali* pun menjadi manifesto politik kebudayaan untuk menanamkan kepercayaan diri kultural orang Bali, termasuk membuat sebuah dikotomi; Bali dan bukan Bali. Jika sebelumnya identitas orang Bali dibangun oleh Belanda dan Pemerintah Orde Baru, pasca-reformasi identitas mereka dibangun oleh media *BP*.

Tidak dipungkiri, wacana *Ajeg Bali* yang lahir pascareformasi ini memang sangat berpengaruh terhadap cara berkata, berpikir dan bertindak orang Bali. Melalui istilah *Ajeg Bali*, mereka dibuat merumuskan kebudayaannya sendiri. Kebudayaan Bali yang dimaksud adalah yang sesuai asas *Ajeg Bali* dengan desa pakraman dan aparatusnya sebagai benteng. Bisa dikatakan, sejak digulirkan oleh *BP*, wacana *Ajeg Bali* ini menjadi nafas dari kebudayaan Bali. *Ajeg Bali* ibarat ‘kata sakti’ yang selalu membius orang Bali ketika diminta berbicara tentang Bali dan kebudayaannya. Orang Bali pun dibuat satu nada dalam koor *Ajeg Bali*.

Kemunculan wacana *Ajeg Bali* paralel dengan perkembangan kekuasaan *BP* sebagai media yang memproduksi wacana kebudayaan di Bali. Tingginya tiras penjualan *BP* menunjukkan betapa media ini

sangat berpengaruh membangun opini publik di Bali. Melalui wacana *Ajeg Bali* pula, *BP* menjadi simbol atau 'hero culture' bagi masyarakat Bali. Kendati demikian, *Ajeg Bali* tidak luput dari agenda dan tujuan-tujuan politis-kapitalistik. Artinya, dari sebuah politik kebudayaan, wacana ini berubah menjadi semacam politisasi budaya Bali.

Hal ini terlihat sejak *Bali Post* ikut berperan aktif dalam hajatan politik lokal Bali tahun 2003. Kendati memiliki kedekatan dengan Cokorda Ratmadi yang pada waktu itu sempat ingin maju sebagai Calon Gubernur - namun berakhir tanpa klimaks - *BP* justru lebih memihak Dewa Beratha-Kelakan. Dewa Beratha pun diberi label sebagai Gubernur *Ajeg Bali*. Menurut Nordholt (2007) Satria Naradha mempunyai alasan-alasan tersendiri untuk mendukung Dewa Made Beratha. Stasiun televisinya sedang menghadapi bahaya karena ia mulai siaran sebelum undang-undang baru mengenai televisi lokal (UU No. 32/2002) diberlakukan. Satria Naradha membutuhkan mediasi Dewa Beratha di Jakarta agar televisi miliknya bisa tetap siaran, dan akhirnya ia berhasil.

Kasus ini terulang lagi saat Pemilihan Gubernur Bali periode 2013-2018. Pada waktu itu, *BP* kembali berperan melakukan politisasi wacana *Ajeg Bali*. Wacana ini dimainkan untuk mendukung salah satu calon Gubernur dari Puri Satria yakni A.A Ngurah Puspayoga. Sejak awal *BP* memainkan wacana *Ajeg Bali* untuk melegitimasi Puspayoga sebagai pemimpin yang membawa moral *Ajeg Bali* ke depan.

Di sini bisa dilihat, sejak pemerintahan kolonial sampai pada reformasi, terjadi sebuah *setting* politisasi budaya di Bali. Wacana-wacana kebudayaan dan representasi citra Bali yang dikonstruksi melalui media massa cetak memiliki tujuan-tujuan politis-praktis kapitalistik. Menariknya, setelah lama aktor luar memainkan politik representasi kebudayaan Bali, kali ini aktor lokal dengan kekuatan opini dan wacana media massa ikut memainkan peran dalam *setting* politisasi budaya.

5.4 Orientasi Misionaris Media

Menurut Ashadi Siregar (1992) kemunculan pers didorong oleh dua paradigma. Pertama dorongan misionaris, yaitu dengan mengubah masyarakat agar sesuai dengan standar kehidupan yang diakui oleh si komunikator. Dorongan semacam ini bisa berdalih agama, pembangunan, atau apapun yang dianggap luhur dalam kehidupan, termasuk kebudayaan. Jurnalisme ini mengutamakan gagasan, doktrin atau ideologi sebagai bahan baku dan acuan informasinya. Sementara dorongan paradigma kedua, bertolak dari penemuan kebutuhan masyarakat akan realitas. Dengan begitu jurnalisme merefleksikan masyarakat dengan masyarakat asumsi bahwa informasi yang bernilai adalah realitas yang langsung dalam masyarakat.

Sementara jurnalisme gagasan/misionaris bertentangan dengan kecenderungan alamiah

masyarakat. Masyarakat menginginkan realitas objektif di seputar dirinya, agar dia dapat menentukan sikap dan mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Makin sadar seseorang akan kediriannya dengan sosialitasnya, makin keluar dia dari dunia psikologisnya. Dunia sosial ditandai dengan kesadaran akan lingkungan secara objektif, sedangkan dunia psikologis ini melalui keterhiburan atau kenyamanan psikis.

Dengan begitu kebutuhan akan informasi ini dapat juga digunakan dalam membedakan kecenderungan masyarakat berdasarkan kutub-kutub sosialitas dan psikologis ini. Posisi seseorang dalam masyarakat akan menempatkan dirinya ke dalam kecenderungan motivasi yang bergerak di antara polaritas tersebut. Dengan memahami orientasi pengelola media massa (misionaris atau refleksi masyarakat), dan pra-anggapan tentang kebutuhan sasaran (peran sosial atau dunia psikologis), peneliti mencoba menganalisis kemunculan wacana *Ajeg Bali* yang diluncurkan media massa cetak sebagai sebuah praktik misionaris dari jurnalisme, selain merupakan kebutuhan secara sosial.

Wacana *Ajeg Bali* yang diluncurkan BP adalah praktik dari misionaris media karena bertujuan mengubah masyarakat agar sesuai dengan standar kehidupan yang diakui oleh si komunikator (*Bali Post*). Wacana *Ajeg Bali* pun seolah menjadi doktrin, ideologi, bahan baku yang diacu oleh masyarakat. Memang sejak awal diluncurkan, wacana ini memiliki

tujuan-tujuan strategis yakni merespon gejala-gejala modernitas-kapitalistik yang masuk ke Bali yang dianggap mengancam sendi-sendi kebudayaan Bali. Wacana ini pun dirumuskan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, baik dari kelas menengah terdidik, budayawan, dan tokoh agama di Bali.

Orientasi misionaris pemilik media sangat berperan dalam pemunculan wacana *Ajeg Bali* ini. Seperti dikatakan Nordholt, wacana *Ajeg Bali* menandai sebuah *renaissance* budaya Bali sebagaimana disampaikan Satria Naradha. Namun di balik kata itu ada misi-misi khusus bernada etnik dan agama, salah satunya adalah menggencarkan aksi *sweeping* kepada perantau non Hindu. Di sini wacana *Ajeg Bali* menampilkan misionaris etnik dan agama. Nordholt (2007: 537) menuliskan:

“Ketika saya bertemu dengan Satria Naradha, ia berbicara tentang *Ajeg Bali* sebagai sebuah *renaissance* budaya, tapi ketika asisten saya secara sambil lali menanyakan padanya apa arti hal itu dalam praktik, ia langsung mengetengahkan *sweeping* terhadap para perantau sebagai agenda paling atas”.

Memang orientasi misionaris *BP* melalui wacana *Ajeg Bali* ini tampak pasca-reformasi, sebelumnya *BP* digelorkan sebagai Koran yang Nasionalis dengan *tagline* sebagai pengamal dan pengemban Pancasila. Sebelum dipimpin Satria Naradha – atau lebih tepat ketika dipimpin K. Nadha, *BP* masih berorientasi

dominan sebagai Koran refleksi masyarakat, memberikan pencerahan, mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat secara demokratis. Kendati saat ini misi refleksi sosial masih dilakukan *Bali Post*, namun nada-nada misionaris masih mendominasi—bahkan cenderung kapitalistik-transaksional. Berikut kutipan pesan K. Nadha pada Hari Ulang Tahun *Bali Post* ke -52 16 Agustus 2000.

“Memasuki usia yang sudah lebih dari setengah abad ini, seharusnya kita insan pers lebih dewasa dan bertindak bertanggung jawab dalam makna tidak lepas dari dimensi hukum yang ada. Bertanggung jawab menolak tradisi berbohong, menghasut, mencemarkan nama baik, informasi tidak seimbang dan subyektif dalam pemberitaan. Apalagi membesar-besarkan persoalan secara tidak profesional dan berita-berita yang tidak mendukung upaya mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat secara demokratis”.

Latar belakang kehidupan, lingkungan dan pengalaman pemilik media juga sangat berpengaruh pada sikapnya dalam menjalankan fungsi pers. Seperti diketahui Satria Naradha dikenal sebagai seorang aktivis budaya. Gerakan Muslim dan Hindu modernis dari masa 1990-an, ketika ia belajar jurnalisme di Surabaya, dianggap menjadi inspirasi atas aktivitas-aktivitasnya (Nordholt, 2007:534) -

selain juga sikap misionarisnya akan kebudayaan Bali, termasuk meletupkan jargon *Ajeg Bali*.

Melalui jargon *Ajeg Bali* yang disebarluaskan kelompok media yang dipimpin Satria Naradha, masyarakat Bali diseret masuk ke wilayah privat psikologis. Wacana *Ajeg Bali* pun memberi kenyamanan psikis, tempat orang Bali menegaskan identitas dan eksistensinya, atau memberi hiburan dan romantisme kebaliaannya. Ketika *BP* memunculkan wacana *Ajeg Bali*, hubungan emosi Koran ini dengan masyarakat Bali semakin kuat, mungkin juga sangat berdampak pada oplah dan tiras *BP* untuk tingkat lokal.

Risikonya, masyarakat dibuat tercerabut dari dunia sosial dan lingkungan obyektifnya, sehingga minimnya refleksi sosial. Mereka menjadi masyarakat-masyarakat yang mengalami histeria identitas dan cenderung bersikat reaktif jika ada pihak-pihak yang dianggap memberikan perasaan tidak nyaman atau mengguncang identitas kebudayaannya. Pendek kata, kemunculan wacana *Ajeg Bali* sebagai produk dari orientasi misionaris media, justru mencetak subyek-subyek reaktif, dogmatis dan restriktif dalam memahami agama dan kebudayaannya.

Sebenarnya, orientasi misionaris pers juga diterapkan oleh media-media lain. Seperti misalnya *Kompas* yang tergolong korang paling sukses di Indonesia. Namun kesadaran orientasi *Kompas* adalah dominan untuk merefleksikan masyarakat. Meski tidak diingkari bahwa ada misi di belakangnya, tetapi

bukan dengan doktrin yang dijadikan informasi, berbeda dengan *BP* menjadikan doktrin *Ajeg Bali* dalam menyebarkan informasi.

Ini pula yang bisa menjawab mengapa media cetak yang berpretensi untuk mengubah masyarakat secara doktriner, tidak dapat berkembang secara nasional dan cenderung terkungkung di tingkat lokal. Kecenderungan untuk mengubah masyarakat secara langsung agar sesuai dengan doktrin (seperti *Ajeg Bali*) akan menjadikan media berorientasi misionaris. Kalaupun ada pretensi untuk mengubah, harus datang menyusul, setelah orientasi primernya yaitu merefleksikan masyarakat dapat dijalankan. Dengan begitu orientasi mengubah masyarakat itu harus dengan kerendah-hatian, yaitu dengan menempatkan media massa sebagai salah satu variabel, di antara sekian banyak variabel lainnya.

Resiko Munculnya Wacana Kebudayaan dalam Politik Media

6.1 Pergeseran Sensibilitas

Munculnya wacana *Ajeg Bali* dalam arena politik lokal yang digunakan oleh *BP* untuk melegitimasi A.A Ngurah Puspayoga sebagai calon Gubernur *Ajeg Bali*, sementara Made Mangku Pastika direpresentasikan sebagai calon Gubernur yang sebaliknya, secara tidak langsung berimplikasi pada terjadinya pergeseran sensibilitas di Bali. Awalnya wacana *Ajeg Bali* membawa sensibilitas pembangunanisme, industrialisme, urbanisme, etnisitas dan agama, bergeser ke sensibilitas klan/soroh.

Menurut Dwipayana (2003), wacana *Ajeg Bali* ditentukan secara dominan oleh tiga tafsir aktor utama, salah satunya adalah kelompok konservatif romantik. Dipastikan wacana *Ajeg Bali* mengandung selubung kepentingan politis-ideologis untuk

membuka ruang bagi kembalinya struktur politik tradisional yang sedang mengalami krisis legitimasi. Dengan demikian tafsir konservatisme-romantik dalam wacana *Ajeg Bali* bisa membawa Bali ke ranah pentradisional politik maupun refeodalisasi kebudayaan Bali.

Benih-benih sensibilitas kelompok ini tampak ketika muncul sebuah perkumpulan sosial yang menamakan diri Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB). Koalisi ini dimotori oleh Putu Wirata Dwikora (ketua KMPB), ia juga menjabat sebagai Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat, Wayan Suyadnya (sekretaris), Wayan Sudirta (penasehat), dan Prof. Dr. Made Bhakta.

Sebagaimana diketahui, Wirata Dwikora dan Sudirta adalah tokoh-tokoh gerakan Hindu modernis yang terlibat dalam konflik Parisada yang dikenal dengan konflik Parisada Campuhan dan Besakih. Sementara Wayan Suyadnya pada waktu itu masih aktif menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian *Bali Tribune*.

Pada tanggal 4 April tahun 2013 koalisi ini menggelar serangkaian acara Rsi Bhujana di Inna Bali Hotel, Jalan Veteran Denpasar. Kurang lebih 107 *sulinggih* hadir dalam acara tersebut. *Sulinggih* yang hadir terdiri dari semua unsur, seperti Pedanda, Mpu, Sira Mpu, Rsi, Sri Bagawan, dan Duku. Acara Sri Bhujana ini juga disertai dengan diskusi.

Sulinggih yang berbicara saat itu adalah Rsi Agni Jayamukti, Mpu Jaya Dangka Ramana Putra, Mpu

Siwa Putra Dhaksa Manuaba, Sira Mpu Dharma Sunu, Rsi Bhujangga Kerta Buana, Mpu Reka tanaya, Mpu Siwa Buda Dhaksa Darmita, Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba, dan Mpu Dhaksa Winata. Dari deretan nama *sulinggih* yang hadir, memang dominan dari unsur Sira Mpu dan Mpu.

Menariknya, para *sulinggih* tidak hanya mendialogkan urusan-urusan keagamaan saja, melainkan juga masalah politik. Dari diskusi tersebut mencuatlah wacana agar Gubernur terpilih nantinya *Satya Wacana*, artinya apa yang dijanjikan ketika kampanye harus direalisasikan. Berangkat dari wacana *Satya Wacana* tersebut, keluar gagasan untuk membuat sebuah kontrak politik atau sejenis pakta integritas. Kontrak politik ini dipergunakan untuk mengontrol atau menagih janji pemimpin terpilih jika dalam kenyataannya tidak memenuhi janji-janjinya. Kira-kira demikian pernyataan Putu Wirata Dwikora yang dimuat harian *Bali Tribune* hari Jumat tanggal 5 April 2015.

“Fakta integritas ini dipergunakan untuk mengontrol atau menagih janji pemimpin yang dikatakan saat kampanye. Soalnya sejumlah janji yang diwacanakan dalam kampanye terbuka dianggap tidak cukup kuat untuk mengontrol, dan karenanya komitmen tertulis diyakini jauh lebih baik. (BT/5/4/2013).

Masalah-masalah Bali yang dititipkan KMPB

untuk masuk dalam kontrak politik terdiri dari beberapa poin. Pertama, pentingnya melestarikan bahasa Bali melalui regulasi yang memasukkannya dalam mata pelajaran di sekolah, memperjuangkan otonomis khusus untuk Bali, melindungi dan mengamankan tanah-tanah laba pura serta tanah adat dari pengambilalihan investor nakal, melindungi dan mempertahankan *bhisama* kesucian pura PHDI yang tertuang dalam Perda Tata Ruang Bali, mencegah dan memberantas korupsi, melakukan pemerataan pembangunan di Bali, dan pentingnya gubernur serta kepala daerah melibatkan *sulinggih* semua unsur sebagai *bagawanta* dalam pengambilan keputusan.



Berita Tentang acara *Rsi Bhujana*

Namun ada satu poin lagi yang menarik perhatian, yakni pemimpin terpilih diminta memberi penghargaan terhadap *Sarwa Sadaka* dalam upacara-

upacara yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. Artinya dalam konsep *Sarwa Sadaka*, semua (sarwa) *sulinggih* yang telah me-*dwijati* (sadaka) yang terdiri dari berbagai macam unsur, seperti Sira Mpu, Mpu, Dukuh, dan Sri Begawan diberikan posisi yang sama dengan *sulinggih* dari golongan *Brahmana Wangsa* dalam setiap penyelenggaraan upacara agama.

Wiwini Minggu (17/4/2013) saat datanya mengenai konsekuensi perbuatannya. KE HAL. 11

Wiwini Suwandi

KMPB Tawarkan Kontrak Politik ke Pasti-Kerta

Diminta Beri Penghargaan Pada *Sarwa Sadhaka*

Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) yang didukung oleh 107 Sulinggih memberikan tawaran kontrak politik kepada Paket Pasti-Kerta. Salah satu itemnya adalah memberi penghargaan pada *Sarwa Sadhaka* dalam pelaksanaan upacara yadnya, baik yang diadakan pemerintah maupun masyarakat.



Putu Wirata Dwikora

DENPASAR-Fajar Bali
Ketua KMPB, Putu Wirata Dwikora mengatakan bahwa tawaran kontrak politik tersebut mendapat dukungan dari Made Mangku Pastika sendiri. "Calon gubernur, Made Mangku Pas-

tika mengatakan sepakat atas sejumlah item substansi dalam kontrak politik," terang Wirata Dwikora akhir pekan lalu.

Bahkan Wirata Dwikora juga mengagendakan pertemuan dengan Made Mangku Pastika dan Ketua Sudikerta untuk menindaklanjuti kontrak politik itu. Dwikora menyatakan hal tersebut disela-sela menerima kepala dusun dari Buleleng dan Karangasem, yang datang khusus ke Posko KMPB di Denpasar.

Para kadus mendukung model kontrak politik yang teretus dalam acara Rsi Bujana, selain menipiskan KE HAL. 11

I PENGOBATAN REUMATIK

Kontrak Politik Berisi Poin *Sarwa Sadaka*



Poin Kontrak Politik yang dimuat *Fajar Bali*

Sebagaimana diketahui, isu tentang kedudukan *sulinggih* dalam muput upacara agama merupakan isu historis dari konflik kasta di Bali. Pada tahun 1980-an, perdebatan soal kedudukan *sulinggih* dalam memimpin upacara agama dalam karya agung *Eka Dasa Rudra*, yaitu upacara *bhuta yadnya* seratus tahun sekali yang dilaksanakan di Besakih juga muncul. Pada saat itu, upacara *bhuta yadnya* dipuput oleh Pedanda Siwa, Budha dan Rsi Bhujangga (Triguna, 1997:245). Ketiga pendeta ini disebut sebagai *Tri Sadaka*. Istilah ini muncul atas jasa Mpu Kuturan ketika berusaha menyatukan Sembilan sekte menjadi Budha, Siwa dan Waisnawa di Bali (Eiseman, 1994:70).

Tawaran kontrak politik ini disosialisasikan

selama tiga bulan kepada kepala dusun di seantero Bali untuk ditindaklanjuti. Menurut Wirata Dwikora, pada saat itu para kadus mendukung model kontrak politik yang tercetus dalam acara *Rsi Bhujana*. Kontrak politik yang berisikan poin penghargaan *Sarwa Sadaka* dalam upacara-upacara agama yang dilaksanakan, baik pemerintah maupun masyarakat ini ternyata mendapat respon positif dari Made Mangku Pastika.

Kesiapan inkumben Made Mangku Pastika melakukan kontrak politik dengan KMPB diberitakan secara khusus di *headlines news* surat kabar *Bali Tribune* - Koran yang memosisikan diri pro Mangku Pastika. Dalam terbitan hari Sabtu tanggal 6 April, *Bali Tribune* memuat berita dengan judul "Mangku Pastika Siap Kontrak Politik". Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2013, kandidat Mangku Pastika dan Sudikerta secara resmi menandatangani kontrak politik yang ditawarkan KMPB. Dari pihak KMPB yang ikut menandatangani yakni Putu Wirata Dwikora dan Wayan Suyadnya. Ada penambahan poin dalam kontrak politik tersebut yakni mendukung pendirian World Hindu Parisad, memperjuangkan nasib kadus, dan penambahan ruang rawat inap kelas III.



Mangku Pastika-Sudikerta Meneken Kontrak Politik

Acara penandatanganan kontrak politik ini dimuat menjadi berita *headline news* di dua media massa cetak yakni *Bali Tribune* dan *Fajar Bali*. Pada terbitan 13 April 2013 *headline news* harian *Fajar Bali* adalah “Pasti-Kerta Teken Kontrak Politik”, begitu juga *Bali Tribune* memuat berita dengan judul yang sama. Dalam tubuh berita, baik *Fajar Bali* maupun *Bali Tribune* memuat pernyataan Mangku Pastika yang siap menandatangani dan melaksanakan isi kontrak politik ketika dirinya terpilih menjadi Gubernur Bali periode 2013-2018. Menurut Mangku Pastika, kontrak politik yang ditawarkan tersebut merupakan kontrak *sekala-niskala*. Berikut pernyataannya:

“Bagi saya ini bukan hanya kontrak politik, tapi juga kontrak *sekala-niskala*. Makna terpenting

dari kontrak politik ini adalah tanggung jawab kami pada masyarakat Bali. Kami sangat siap, apalagi yang terkandung di dalamnya juga hampir sama dengan program Bali Mandara jilid II yang sudah kami susun". (BT/13/4/2013).

Kendati Ketua KMPB Putu Wirata Dwikora usai acara penandatanganan kontrak politik menegaskan bahwa koalisi ini dibangun independen dan terbuka untuk kedua paket kandidat, namun munculnya wacana *Sarwa Sadaka* (penerimaan kedudukan *sulinggih* di luar wangsa *Brahmana Wangsa*) secara tidak langsung mengindikasikan munculnya benih-benih sensibilitas golongan/kelompok.

Apalagi, dalam kontrak politik tersebut kelompok tertentu memperjuangkan agar *sulinggih*-nya diberikan kedudukan yang sama dengan *sulinggih* dari golongan *Brahmana Wangsa*, baik dalam upacara agama di pemerintahan maupun upacara agama di masyarakat. Artinya dengan ditandatanganinya isi kontrak politik tersebut oleh Mangku Pastika dan Sudikerta yang merupakan Cagub dan Cawagub dari non *Tri Wangsa*, bisa menjadi alasan bagi warga dari golongan non *Tri Wangsa* yang aspirasinya terangkum dalam kontrak politik untuk memilih paket Pastika-Sudikerta.

Menurut amatan penulis, munculnya wacana *Sarwa Sadaka* dalam poin kontrak politik ini hanyalah

sarana atau media untuk membangun sensibilitas klan dalam arena politik lokal Bali untuk memilih pemimpin Bali. Kontrak politik ini adalah wacana tandingan terhadap upaya BP melegitimasi tokoh dari Puri Satria sebagai calon Gubernur yang *Ajeg Bali*. Dalam artian, munculnya wacana *Ajeg Bali* yang diidentikkan dengan Puspayoga – yang *notabene* dari golongan *Tri Wangsa* – secara tidak langsung berimplikasi pada pergeseran sensibilitas masyarakat dalam memilih pemimpin. Pengidentikan Puspayoga sebagai Cagub *Ajeg Bali* tersebut membuat wacana *Ajeg Bali* ini bertendensi feodalistik-konservatif.

6.2 Gugatan dan Resistensi Sosial

Kuatnya hegemoni wacana dominan *Ajeg Bali* yang sampai meluas ke arena politik lokal bukan tanpa resistensi dari masyarakat Bali. Sejak awal dimunculkan sebagai diskursus budaya, dominasi wacana *Ajeg Bali* mendapatkan gugatan secara ekspresif dari subkultur Bali kontra hegemonik yang menganggap wacana ini hanya melanggengkan kekolotan orang Bali dalam memandang kebudayaannya.

Menurut Dwipayana (dalam Nordholt, 2010: xxiv) dalam arena politik kebudayaan, tidak semua kelas menengah terabsorpsi dalam wacana *Ajeg Bali*. Berbagai inisiatif gerakan kelas menengah bermunculan dengan mengusung tema-tema Bali yang lebih terbuka. Dwipayana mengambil salah satu

contoh menarik untuk representasi budaya Bali yakni proyek Bali Biennale.

Pada akhir bulan Agustus sampai dengan bulan September 2005, berlangsung serangkaian pameran pra-Biennale di sembilan galeri berbeda dengan menampilkan 95 orang perupa. Bali Biennale berani melakukan pembacaan baru yang sistematis dan komprehensif dalam perjalanan seni rupa Bali, di tengah arus deras arogansi etnis, benturan kebudayaan, Jawa pobia dan radikalisasi Hindu yang melanda Bali. Menurut Dwipayana di tengah dominannya wacana *Ajeng Bali*, Bali Biennale telah membawa perspektif baru dengan berupaya merumuskan kebudayaan Bali sebagai kebudayaan yang terbuka.

Tidak hanya para perupa, gugatan terhadap sesaknya wacana *Ajeng Bali* juga disuarakan oleh *Superman Is Dead*. Grup band yang digawangi tiga anak muda Bali yang bermarkas di Kuta ini menganggap wacana dominan *Ajeng Bali* sebagai ekspresi kekolotan dan upaya *status quo* oleh kelompok tertentu. Mereka pun membongkar kekolotan wacana *Ajeng Bali* lewat gebukan drum dan lengkingan suara gitar. Gugatan *Superman Is Dead* terhadap jargon *Ajeng Bali* ini dimuat majalah *Sarad* edisi Juni tahun 2009 dengan judul 'Ajeng Bali Telah Mati'.

Gugatan bahkan resistensi yang lebih riil dan eksplisit kembali ditunjukkan oleh masyarakat Bali ketika wacana *Ajeng Bali* ini dimunculkan oleh BP untuk provokasi dan justifikasi politik. Seperti yang

sudah dijelaskan panjang lebar di bab sebelumnya, BP menghadirkan wacana *Ajeg Bali* untuk melegitimasi A.A Ngurah Puspayoga sebagai calon Gubernur Bali. Sementara Made Mangku Pastika hadir dengan wacana Bali Mandara. Kemunculan wacana Bali Mandara ini kontras dengan wacana *Ajeg Bali*. Dengan menggunakan frase Bali Maju, Mangku Pastika dianggap *out of the box Ajeg Bali*.

Provokasi dengan wacana *Ajeg Bali* dan iklan Ganti Gubernur yang ditampilkan BP pada Pilgub Bali 2013 secara langsung memantik kemarahan masyarakat Bali. Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2013 masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Bali Anti Pembohongan Publik yang berjumlah sekitar 200-orang melakukan aksi pembakaran terhadap ratusan Koran *Bali Post* di depan Bajra Sandhi Lapangan Niti Mandala Renon. Aksi pembakaran ini dibungkus lewat istilah 'ritual pengabenan' dengan melibatkan sembilan pemangku yang datang lengkap dengan atribut kepemangkuannya. Saat melakukan pembakaran, pemangku ini merapalkan *japa mantra* dengan sesaji dupa sehingga asap mengepul di halaman Bajra Sandhi. Di samping itu dipakai juga kayu bakar sebagai alas pembakaran.



Berita Pengabenan Koran *Bali Post* di Bajar Sandhi

Koran *BP* dituding melakukan provokasi aktif baik melalui pemberitaan dan iklan banner yang seolah-olah ingin mengajak masyarakat Bali mengganti Gubernur dan memilih Gubernur yang dilegitimasi *BP* melalui wacana Ajeg Balinya. Selain itu, Koran *BP* juga melakukan pembohongan publik dengan terus menjelekkkan salah satu kandidat. Sementara istilah *pengabenan* yang digunakan oleh aliansi ini hanya sebagai simbol membunuh niat jahat dan tingkah laku *BP* yang menggiring opini publik ke salah satu kandidat saja yakni A.A Ngurah Puspayoga.



Berita Pembakaran *Bali Post* di Buleleng

Tidak hanya di Denpasar, aksi serupa juga muncul di Kabupaten Buleleng. Ratusan warga yang menamakan dirinya Gabungan Elemen Peduli Ragam Media (Gempur Media) bersama ormas Banzer Buleleng ramai-ramai membakar Koran *BP* di depan kantor RRI Singaraja. Aksi pembakaran ini merupakan pernyataan sikap kelompok masyarakat tersebut terhadap *BP* yang menyajikan berita-berita provokatif terhadap salah satu kandidat dengan iklan Ganti Gubernur dan stigma *Ajeg Bali* yang hanya dilekatkan pada Puspayoga. Sama seperti aspirasi Aliansi Masyarakat Anti Pembohongan Publik, kelompok massa ini juga menuding *BP* melakukan pembohongan publik yang sangat massif dan terencana.

Aksi pembakaran ratusan Koran *BP* yang dilakukan di dua tempat tersebut dimuat menjadi berita *headline* di dua harian yang sejak awal

memposisikan diri sebagai mitra Mangku Pastika. Harian *Fajar Bali* pada terbitan 3 Mei 2013 memuat berita pembakaran tersebut dengan judul yang cukup tajam yakni “Dituding Provokatif, Bali Post Dibakar”.

Sementara harian *Bali Tribune* pada terbitan 3 Mei 2013 memuat berita *headline* di halaman utama dengan judul “Bali TV Meresahkan”, dengan anak judul “Koran Bali Post Diaben di Bajra Sandi”. Di bawah berita *headline*, *Bali Tribune* juga memuat aksi pembakaran BP di Singaraja dengan judul “Gempur Media dan Banzer Bakar Koran Bali Post”. Dalam tubuh berita *Fajar Bali* ketua Aliansi Masyarakat Bali Anti Pembohongan Publik Wayan Bhaskara memberikan pernyataan sebagai berikut;

“Koran *Bali Post* sudah sangat meresahkan publik Bali. Berita-berita Pilgub yang dimuat *Bali Post* sangat tendensius dan cenderung memprovokasi publik untuk memilih salah satu kandidat dan menjelekkkan kandidat lain. *Bali Post* juga memuat iklan dan berita yang bernada pembohongan publik. Dengan melibatkan sembilan pemangku kami melakukan aksi pengabenan. Yang di *pralina* adalah niat jahatnya. Semoga setelah diaben bisa lahir kembali dengan niat baik dan semangat baru”.

Aksi perlawanan terhadap BP terus berlanjut. Pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2013, tepat pada hari kebebasan pers dunia, ratusan warga berbadan

gempal yang menamakan diri Masyarakat Bali Peduli Pers mengerubungi kantor harian *BP* di Jalan Kepundung Denpasar. Mereka melakukan aksi demonstrasi terhadap *Bali Post* dan *Bali TV*. Aksi massa ini mendapat pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian. Massa melakukan *long march* dari Pura Jagatnaha Denpasar menuju jalan Kepundung. Sesampainya di depan kantor Bali Post, massa tidak diijinkan masuk ke dalam kantor. Akibatnya ruas Jalan Kepundung Denpasar ditutup toal. Mereka diterima langsung Pemimpin Redaksi *Bali Post* Nyoman Wirata.

Tuntutan aliansi ini sama, yakni mendesak *BP* agar menghentikan pemuatan iklan dan berita provokatif terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali tahun 2013. Massa menuding pemberitaan yang dilakukan *Bali Post* membawa benih-benih konflik di Bali, apalagi hanya mengakomodir suara dari salah satu kandidat saja, dan mendiskreditkan kandidat yang lain. Aksi demonstrasi massa ini dimuat secara khusus menjadi *headline news* di halaman utama *Bali Tribune* pada terbitan 4 Mei 2013 dengan judul “Bali Post Didemo”.



Berita *Bali Post* Didemo Massa

Belum selesai sampai disitu. Berselang empat hari, aksi serupa kembali meletus di Kantor *BP*. Kali ini ratusan massa yang mengatasnamakan Banser Buleleng yang melakukan aksi demonstrasi. Koordinator aksi saat itu adalah Made Swadarmayasa. Aspirasi yang disampaikan pun sama dengan pelaku demonstrasi sebelumnya yakni mendesak *Bali Post* menghentikan pemberitaan yang provokatif terkait Pilgub Bali. Bahkan mereka juga meluncurkan imbauan kepada masyarakat Bali agar memboikot terbitan Koran *Bali Post* yang pemberitaannya tidak berimbang dan independen.

Dari ketegangan dan resistensi tersebut bisa dilihat, meskipun hegemoni wacana *Ajag Bali* oleh *Bali Post* mengimplikasikan tingkat konsensus yang

tinggi, namun tidak berarti masyarakat berada pada situasi tanpa konflik. Akan selalu muncul kelompok yang memosisikan diri sebagai kontrahegemonik yang resisten terhadap kekuasaan *BP* dan wacana kebudayaan *Ajeg Bali*.

6.3 Runtuhnya Jargon *AB* dan Kebangkitan Media Lokal

Resistensi masyarakat terhadap sikap politik *BP* saat pemilihan Gubernur Bali tahun 2013 ternyata sangat berimplikasi pada hasil perolehan suara kedua kandidat yakni Mangku Pastika-Sudikerta dan Puspayoga-Sukrawan. A.A Ngurah Puspayoga yang diidentikkan sebagai calon Gubernur *Ajeg Bali* oleh *Bali Post* mengalami kekalahan dari paket Mangku Pastika-Sudikerta.

Dari hasil rekapitulasi suara seluruh kabupaten/kota yang diplenokan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Minggu 26 Mei Tahun 2013, Made Mangku Pastika memperoleh suara 50,02 persen, sementara A.A Ngurah Puspayoga 49,98 persen. Kemenangan Mangku Pastika-Ketut Sudikerta ini semakin dikukuhkan dengan hasil keputusan di Mahkamah Konstitusi.

Kekalahan A.A Ngurah Puspayoga dalam Pilgub Bali 2013 ini menandai runtuhnya wacana *Ajeg Bali* dalam arena politik lokal. Kendati *BP* secara massif mendeklarasikan A.A Ngurah Puspayoga sebagai calon Gubernur *Ajeg Bali*, namun masyarakat

Bali dominan memilih Made Mangku Pastika yang membawa misi *Bali Mandara* yang berarti Bali Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Artinya, secara tidak langsung bisa dikatakan sebagian besar masyarakat Bali memilih frase Bali Maju – bukan Bali yang *Ajeg*.

Runtuhnya wacana *Ajeg Bali* ini berdampak sangat besar terhadap arah pembangunan Bali dan dinamika sosio-kultural masyarakat Bali. Di tengah kepemimpinan Made Mangku Pastika-Sudikerta, Bali pun semakin menjadi arena terbuka untuk investasi yang datangnya dari luar. Berbagai proyek prestisius mulai masuk ke Bali dan mendapat respon positif dari kekuasaan. Sebut saja pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, serta rencana tol-tol lain di Bali, begitu pula rencana pembangunan bandara di Bali Utara. Di sini frase ‘Bali Maju’ yang dikumandangkan Made Mangku Pastika menemukan bentuk konkretnya.

Tidak hanya dalam konteks pembangunan, runtuhnya wacana *Ajeg Bali* juga ditandai dengan bangkitnya media-media lokal di luar *Kelompok Media Bali Post* pimpinan Satria Naradha. Sejak berselisih dengan *Bali Post*, Made Mangku Pastika akomodatif terhadap media-media lokal non *mainstream* di Bali.

Pasca Pilgub Bali 2013 lalu, terbit dua media massa cetak harian di Bali. Dua media itu yakni *Pos Bali* dan *Tribun Bali*. Koran *Pos Bali* terbit perdana pada tanggal 28 Juli tahun 2013 dengan berkantor di Jalan Tohpati. *Owner* Koran ini adalah dr. I Gusti Ngurah Oka, Mantan Kepala Dinas Kesehatan Denpasar yang juga pemilik radio Gema Merdeka,

sementara pemimpin umum dijabat oleh Made Nariana. *Pos Bali* juga diperkuat beberapa redaktur tamu sekaligus esais senior seperti Putu Setia (kini sulinggih) dan Raka Santeri. *Launching* Koran *Pos Bali* ini didatangi langsung oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Sementara Koran *Tribun Bali* terbit belakangan. Koran *Tribun Bali* adalah salah satu anak usaha penerbitan grup Kompas Gramedia di daerah. Terbitnya *Tribun Bali* memang cukup mengejutkan dunia bisnis media massa cetak di Bali, pasalnya Koran ini berani terbit di pasaran dengan harga seribu rupiah – berbeda dengan Koran lain di Bali yang rata-rata seharga 3000 per eksemplar. Sejak terbit perdana, Koran *Tribun Bali* mengusung *tagline* “Spirit Baru Pulau Dewata” – *tagline* ini paradoks dengan *Ajeng Bali* dari *Bali Post*. *Tribun Bali* menyajikan informasi dengan gaya bahasa ringan dan bertutur untuk pangsa kelas menengah ke bawah di Bali – kadang menampilkan tulisan *feature* yang sangat renyah.

Terbitnya dua Koran ini menambah semakin heterogen informasi yang diterima masyarakat Bali. Hegemoni opini publik yang selama ini dilakukan *BP* kian memudar karena masyarakat Bali bebas memilih santapan informasi yang disajikan media-media lokal di Bali. Apalagi, perkembangan media digital dan online membuat masyarakat Bali bisa mengakses informasi secara cepat. Tumbuhnya jurnalisme warga yang informatif juga turut mewarnai media-media sosial. Artinya, kesadaran orang Bali tidak lagi hanya

dibentuk oleh *Kelompok Media Bali Post*, melainkan juga Koran-koran lain, media-media online yang tentunya membawa misi, kepentingan, dan sensibilitas masing-masing.

Di sini bisa dikatakan, untuk kasus Bali, kebangkitan media-media lokal terjadi pascareformasi dan Pilgub Bali 2013. Kebangkitan media lokal di Bali bisa dipandang positif, karena akan berdampak pada terciptanya masyarakat argumentatif – sekaligus merobohnya penunggalan wacana, hegemoni kekuasaan dan absolutisme subyek. Kendati informasi di media massa cetak masih membawa kepentingan dan ideologi tertentu, publik akan menjadi tempat memfilterisasi informasi tersebut. Di sinilah diskursus publik yang akan bekerja.

INDEKS

A

Ajeg Bali xi, xiv, xv, xvi, xvii,
xviii, xix, xxi, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 59, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 72,
73, 74, 76, 79, 80, 81, 83,
84, 86, 87, 89, 90, 98, 99,
100, 102, 105, 106, 107,
108

Althusser 32, 33, 34, 35

Ashadi Siregar 82

Atmakusumah 5

B

Bali Adnyana xxv, 37, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47

Baliseering 77

Bertens 27, 32

Bourdieu 75

C

Covarrubias 77

D

Dharma Putra 39, 41, 42, 47,
48, 49

Dwipayana 20, 76, 78, 89, 98, 99

E

episteme 31, 60

Eriyanto 27, 29, 30, 35, 64

F

Foucault 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 60, 61, 64, 66, 67, 69

Fukuyama 7

H

Hidayat 7

Hill 3, 4, 5, 6

I

Ishadi 7

Iswandi 6

J

Jenkins 75, 79

K

Ketut Nadha 49, 50

Kuntowijoyo 9, 10, 74

M

Marianne 26, 28

N

Naradha xv, xvi, 10, 12, 70, 72,
81, 84, 85, 86, 107
Nordholt xviii, 9, 10, 11, 13, 16,
66, 70, 72, 75, 78, 81, 84,
85, 98
Nusa xii, 15, 21, 52, 53, 54, 55

O

Oetama 7, 8

P

Pendit 48, 49, 50, 51
Pichard 76, 77, 78
Putra Agung 37, 38, 39, 40, 45,
46
Putu Artha 56

R

Radar Bali 55
Ramstedt 11, 70
Robinson 41, 46, 47, 51

S

Storey 32, 60
Sudibyo 7, 8
Suita Gama Tirta 38
Surpha 71
Surya Kanta xxv, 37, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

Suryakusuma 1
Suryawan iii, vii, xix, xxiii, 11,
12, 14, 63, 64, 66
Suyono 27, 60, 61, 66

T

Takwin 32, 33
Tolson 35
Triguna 13, 38, 39, 40, 41, 43,
44, 94

W

Wahidin 18
Warta Bali 55, 56
Wija 55
Wijaya 63